

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu sumber harta kekayaan bagi umat islam, di Indonesia aset wakaf terbilang besar dan selalu meningkat setiap tahunnya, berdasarkan data dari Direktorat Urusan Agama Islam, pada tahun 1999, jumlah tanah wakaf di seluruh Indonesia tercatat 1.477.111.015 m² yang terdiri dari 349.296 lokasi. Pada tahun 2004, jumlah tanah wakaf tercatat 1.538.198.586 m² yang terdiri dari 362.471 lokasi.¹ Pada tahun 2007, jumlah tanah wakaf meningkat menjadi 2.688.659.047 m² yang tersebar di 366.973 lokasi, kemudian pada data terakhir tanah wakaf di Indonesia tahun 2016 tercatat 4.359.443.170 m² yang tersebar di 435.768 lokasi di seluruh Indonesia.² Dari data yang terlihat di atas menggambarkan bahwa wakaf dari tahun ke tahun cukup pesat perkembangannya dan memiliki potensi yang besar untuk menyejahterakan umat, besarnya potensi tersebut merangsang kita untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, tentang pentingnya wakaf untuk kesejahteraan umat, agar banyak masyarakat yang berpartisipasi mewakafkan sebagian harta yang dimilikinya.

Berdasarkan potensi yang ada, pemerintah cukup serius dalam mengakomodir pengelolaan harta wakaf, hal tersebut diwujudkan lewat peraturan perundang-undangan yang sangat progresif dalam mengakomodir

¹Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif dan Manajemen*, Malang: UIN-Maliki Press, 2011, h. 2.

²Administrator, [Http://bwi.or.id/index.php/in/tentang-wakaf/data-wakaf/data-wakaf-tanah.html](http://bwi.or.id/index.php/in/tentang-wakaf/data-wakaf/data-wakaf-tanah.html) (diakses pada Kamis 28 Maret 2016 pukul 11.04 WIB)

hukum fikih yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf (selanjutnya disingkat UU No. 41 Tahun 2004) dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya (selanjutnya disingkat PP No. 42 Tahun 2006), dengan adanya peraturan tersebut umat islam tinggal menjalankan saja dan tidak perlu lagi banyak berwacana, kalau dulu banyak orang berdiskusi dan berharap adanya lembaga khusus yang menangani perwakafan di Indonesia, maka kini hadir sebuah lembaga atau badan pengelola yang menangani tentang wakaf di Indonesia yaitu BWI atau Badan Wakaf Indonesia (selanjutnya disingkat BWI) sebagai perwujudan terselenggarakannya wakaf dengan baik di Indonesia, setelah lembaga tersebut muncul kini yang harus dilakukan adalah bagaimana memaksimalkan dan mengoptimalkan lembaga independen amanat undang-undang tersebut.³

Wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peruntukannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar fungsi dan tujuan wakaf tersebut berjalan dengan baik maka diperlukan pengelolaan yang profesional, sehingga wakaf yang diberikan oleh *wakif* dapat memberikan kemanfaatan yang besar bagi umat.

Nadzir sebagai orang yang dipercaya dalam mengelola harta wakaf ini sangat menentukan apakah tercapai atau tidak tujuan dari wakaf tersebut, karena peran *nadzir* adalah sebagai pengendali, menentukan, memanajerial

³Peraturan Perundangan, Bab VI, pasal 7, UU No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006.

perwakafan sehingga berdaya guna dan berhasil, inilah yang menjadi tanggung jawab dari BWI dalam melakukan pembinaan dan pengawasan serta membantu segala bentuk pembiayaan yang diperlukan terhadap *nadzir* guna untuk mencapai tujuan tersebut.⁴

Perbuatan wakaf wajib dicatat⁵ dan dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (selanjutnya disingkat AIW) dan didaftarkan kepada instansi terkait untuk diperoleh sertifikat serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf, ini bertujuan untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf.

Meskipun undang-undang sudah mengatur sedemikian rupa mengenai aturan perwakafan, namun fakta yang terjadi di lapangan, masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya atau tidak berjalan dengan optimal, hal tersebut terlihat dari observasi awal penulis yang didapat dari Kementrian Agama Kota Palangka Raya (selanjutnya disingkat Kemenag) mengenai potensi tanah wakaf di Kota Palangka Raya pada tahun 2014, sebagai berikut:

⁴Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan wakaf, 2007, h. 21.

⁵Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 32.

Tabel 1
Data Tanah Wakaf di Kota Palangka Raya

No	Lokasi	Luas M ²	Sudah Sertifikasi (%)	Belum (%)	Ket / Lokasi
1	Kec. Pahandut	1.390.890	741.267 (53%)	649.623 (47%)	39
2	Kec. Jekan Raya	1.744.510	1.727.732 (99%)	16.778 (1%)	53
3	Kec. Sebangau	105.874	31.811 (30%)	74.063 (70%)	13
4	Kec. Bukit Batu	79.028	71.628 (90 %)	7.400 (10%)	15
5	Kec. Rakumpit	131.584	118.554 (90 %)	13.030 (10 %)	3

Sumber: data diperoleh dari Kemenag Kota Palangka Raya Tahun 2014

Daftar tabel di atas menggambarkan bahwasanya masih terdapat daerah atau tempat-tempat di Kota Palangka Raya yang masih belum bersertifikat, hal tersebut tidak boleh dianggap enteng karena ini merupakan amanat dari undang-undang bahwa harta wakaf harus dicatatkan.

Pendaftaran tanah sangat penting dilakukan, apabila di lihat dari sudut pandang masalah, tanah yang tidak dicatatkan akan memudahkan timbulnya penyimpangan dan penyelewengan, misalnya perubahan status atau peruntukan yang tidak sesuai dari peruntukan awal, karena tidak adanya bukti otentik sehingga akan menjadi rawan untuk disalahgunakan, hal senada juga diungkapkan oleh Misbah selaku Kasi Bimas Islam Kemenag Kota sekaligus sekretaris BWI Kota Palangka Raya, bahwasanya hal tersebut merupakan permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan harta benda wakaf di Kota Palangka Raya, perubahan peruntukan atau status yang tidak sesuai dengan peruntukan awal masih marak terjadi dalam pengelolaan harta benda wakaf di Kota Palangka Raya,⁶ berubahnya status tersebut merupakan akibat tidak adanya bukti-bukti tertulis, oleh karena itu pengadministrasian tanah wakaf

⁶Wawancara dengan Misbah di kantor Kemenag Kota Palangka, 28 april 2016.

merupakan hal yang sangat penting agar permasalahan-permasalahan di atas dapat dihindari.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mengharuskan adanya wakaf secara tertulis, tidak cukup hanya dengan lisan saja. Tujuannya adalah untuk memperoleh bukti otentik yang akan dipergunakan untuk didaftarkan dan untuk keperluan menyelesaikan sengketa yang kemungkinan akan terjadi dikemudian hari.

Pelaksanaan perwakafan tidak cukup hanya dengan lisan saja, melainkan harus dicatat oleh pejabat khusus dan kemudian dituangkan dalam akta resmi dan tanah tersebut harus diserahkan kepada pengelola yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang agar tanah wakaf tersebut dikelola secara tertib dan teratur dan kemudian harus didaftarkan kepada Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya disingkat BPN) setempat.

Selain permasalahan sertifikasi, masalah dalam mengelola harta wakaf juga terkait dengan *nadzir* yang masih tradisional.⁷ Pada umumnya, wakaf digunakan hanya untuk mesjid, mushalla, sekolah, makam, pondok pesantren dan masih sedikit sekali yang dikelola secara produktif, hal tersebut dapat dilihat dari data yang penulis dapatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut (selanjutnya disingkat KUA) sebagai berikut:

⁷*Nadzir* tradisional, adalah pengelolaan yang masih berorientasi pada pemahaman wakaf yang masih ditempatkan sebagai ajaran yang murni dimasukan dalam kategori ibadah saja. Disaat wakaf sebenarnya bisa untuk menyejahterkan masyarakat, namun sayang potensi tersebut belum dimaksimalkan. Kebanyakan benda-benda wakaf diperuntukan untuk kepentingan pembangunan fisik seperti mesjid, musholla, pesantren, kuburan, yayasan dan sebagainya.

Tabel 2
Data Penggunaan Tanah Wakaf

Penggunaan Tanah Wakaf		
No	Peruntukan Wakaf	Persentase (%)
1	Mesjid	51.85 %
2	Musholla / Langgar	31.48 %
3	Sekolah / Pesantren	7.41 %
4	Sosial Lainnya	1.85 %

Sumber: KUA Kecamatan Pahandut Tahun 2016

Peruntukan wakaf secara umum di Indonesia memang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya digunakan untuk kepentingan peribadatan saja. Hal tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan umat Islam akan pemahaman wakaf yang sebenarnya bisa juga digunakan ke arah produktif. Dari praktik yang selama ini terjadi dikalangan masyarakat Indonesia menumbuhkan persepsi bahwa wakaf itu hanya dapat berbentuk benda tidak bergerak seperti tanah.

Potensi wakaf sebagai sarana untuk berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat umum belumlah dikelola dan didayagunakan secara maksimal oleh masyarakat Indonesia, padahal di tengah ekonomi yang semakin memprihatinkan ini, sesungguhnya peranan wakaf dapat dimanfaatkan dan ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, pihak yang memang bertanggung jawab atas potret pengelolaan yang terjadi selama ini adalah *nadzir*. Meskipun sebenarnya kita tidak bisa selalu menyalahkan *nadzir*, namun juga terdapat pihak terkait yang berhubungan dengan permasalahan di atas yaitu BWI yang merupakan lembaga nasional amanat undang-undang yang bertanggung jawab atas pengelolaan harta benda wakaf. BWI memiliki fungsi yang sangat strategis dalam mengelola, lembaga tersebut memiliki fungsi dan wewenang

melakukan pembiayaan, pembinaan dan pengawasan serta menegur atau memberhentikan apabila terjadi penyelewengan ataupun peruntukan yang tidak sesuai oleh *nadzir* dalam mengelola.

Agar pengelolaan berjalan secara maksimal, diperlukan sinergitas yang kuat antara *nadzir* dan BWI, keduanya dapat saling membahu dalam bekerjasama, namun tidak hanya keduanya hal ini juga berlaku bagi *wakif* dan aparat penegak wakaf⁸ lainnya juga bisa saling bekerjasama agar pengelolaan wakaf dapat berjalan secara maksimal. Sebagai badan atau lembaga yang berwenang dan lebih besar pengaruhnya, BWI lah yang punya peran penting dalam perwakafan di Indonesia, lembaga tersebut harus punya andil dan mengambil bagian yang besar dalam pola perwakafan di Indonesia. Lembaga tersebut punya peran sentral terhadap aparat penegak wakaf seperti *nadzir*, *wakif* dan aparat yang lainnya. Lembaga nasional tersebut dapat melakukan langkah-langkah seperti membina, memberikan pelatihan, pemahaman terhadap *nadzir* ataupun *wakif* serta membantu segala bentuk pembiayaan yang dibutuhkan *nadzir* dalam mengelola harta untuk menunjang pengelolaan dan kemudian BWI harus mengawasi segala bentuk aktivitas pengelolaan yang terjadi. Semua itu harus dilakukan oleh semua pihak yang terkait agar pengelolaan dapat berjalan secara maksimal. Sinergitas yang kuat antara ke semua pihak penegak wakaf diharapkan dapat menjadi solusi terhadap pola pengelolaan yang selama ini terjadi.

⁸Aparat penegak wakaf adalah Wakif, *Nadzir* dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf terdapat institusi baru sebagai Pembina penyelenggaraan wakaf di Indonesia, yaitu Badan Wakaf Indonesia.

Pada penelitian ini, peneliti fokus pada wilayah Kecamatan Pahandut, karena mengingat terlalu luasnya cakupan daerah di atas, maka penulis terfokus kepada daerah tersebut dan juga masih terlihat masih cukup banyak tanah wakaf yang masih belum bersertifikat, yang mana masalah pensertifikatan ini akan menjadi salah satu fokus kajian pada penelitian ini serta subjeknya pun nantinya akan terfokus kepada *nadzir* di daerah tersebut.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam dan mengangkatnya dalam sebuah judul **“PROBLEMATIKA PENGELOLAAN HARTA BENDA WAKAF DI KECAMATAN PAHANDUT KOTA PALANGKA RAYA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis menetapkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika dalam pengelolaan harta benda wakaf di Kecamatan Pahandut ?
2. Bagaimana solusi terhadap problematika pengelolaan harta benda wakaf di Kecamatan Pahandut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis problematika dalam pengelolaan harta benda wakaf di Kecamatan Pahandut.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis solusi terhadap problematika pengelolaan harta benda wakaf di Kecamatan Pahandut.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian terbagi menjadi dua yaitu:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi sekaligus sumbangan wawasan dalam rangka pengembangan khazanah keilmuan, khususnya pada bidang perwakafan.
2. Secara praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi kepastian hukum, terutama pengaplikasian Hukum Islam di Indonesia.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan skripsi ini disusun sebagai berikut:

1. Bab I, tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
2. Bab II, tentang kajian pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu, tinjauan umum tentang wakaf yang terdiri dari pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, objek, fungsi dan tujuan wakaf kemudian pengelolaan harta benda wakaf terdiri dari badan wakaf, manajemen wakaf, administrasi harta wakaf, *nadzir* profesional dan wakaf produktif kemudian memuat problematika pengelolaan harta benda wakaf, kerangka pikir dan pertanyaan penelitian.
3. Bab III, metode penelitian memuat jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, objek dan subjek penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, pengabsahan data dan analisis data.

4. Bab IV, pemaparan data yang terdiri dari gambaran lokasi penelitian dan analisis data. Analisis data terdiri dari analisis problematika pengelolaan harta benda wakaf dan solusi problematika pengelolaan harta benda wakaf.
5. Bab V, penutup yang terdiri dari kesimpulan penelitian dan saran

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Hasil penelusuran yang penulis lakukan terhadap literatur-literatur yang membahas tentang wakaf, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan, yakni:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nuzula Yustisia dengan judul *“Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Lembaga Amil Zakat di Kota Yogyakarta”*. Penelitian tersebut menghasilkan dua kesimpulan yaitu pertama manajemen pengelolaan wakaf tunai pada LAZIZ Masjid Syuhada dan LAZ Bina Peduli Umat terjaga nilai pokok wakafnya dan masih termasuk kategori wakaf produktif karena dapat mensejahterakan umat, kedua penerimaan wakaf tunai pada lembaga Amil Zakat di kota Yogyakarta belum sesuai dengan konsep penerimaan wakaf tunai pada lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU) yang terdapat dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan PP RI No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.⁹
2. Penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Huda dengan judul *“Tata Cara Ikrar Wakaf Studi Komparasi Antara Fiqh Klasik dan Undang Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”*. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat perbedaan dan persamaan tentang tata cara ikrar wakaf antara fikih klasik dengan undang-undang nomor 41 tahun 2004.

⁹Nuzula Yustisia “Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Yogyakarta”. “Skripsi” 2008, UIN SUKA, t.d.

Perbedaannya di antaranya yaitu dalam fikih klasik pernyataan ikrar dapat dinyatakan hanya dengan lisan sedangkan dalam ketentuan undang-undang ikrar wakaf dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan, sedangkan persamaan ikrar wakaf antara fikih klasik dengan undang-undang tentang wakaf adalah dalam fikih klasik maupun ketentuan undang-undang, ikrar wakaf sama-sama diterima oleh *mauquf alaih*.¹⁰

3. Penelitian yang dilakukan oleh Arief Muzacky Juhanda dengan judul *“Implementasi Wakaf Uang di Badan Wakaf Indonesia”*. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa BWI merupakan badan yang dibentuk untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf baik berskala nasional maupun internasional sesuai dengan amanat undang-undang yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.¹¹

¹⁰Syamsul Huda “Tata Cara Ikrar Wakaf Studi Komparasi Antara Fiqh Klasik dan Undang Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”. “Skripsi” 2009, Pdf, t.d.

¹¹Arief Muzacky Juhanda “Implementasi Wakaf Uang DI Badan Wakaf Indonesia”. “Skripsi” 2011, pdf, t.d.

Tabel 3
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan dan perbedaan
1	Nuzula Yustisia	Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Yogyakarta.	Sama-sama mengkaji tentang bagaimana pengelolaan harta benda wakaf. Perbedaannya adalah peneliti memfokuskan pada problem-problem yang terjadi mengenai pengelolaan harta benda wakaf seperti sertifikasi serta menyoroti profesionalisme <i>nadzir</i> sedangkan Nuzula lebih fokus kepada perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasannya pada lembaga amil zakat serta kesesuaian wakaf tunai pada pedoman penerimaan wakaf tunai pada LKS-PWU.
2	Syamsul Huda	Tata Cara Ikrar Wakaf Studi Komparasi Antara Fiqih Klasik dan Undang Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.	Sama-sama mengkaji tentang problem seputar pelaksanaan wakaf, sedangkan perbedaan terletak pada problem yang dikaji di mana peneliti fokus kepada permasalahan sertifikasi harta benda wakaf serta pembinaan <i>nadzir</i> sedangkan penelitian yang dilakukan Syamsul Huda fokus kepada permasalahan seputar tata cara ikrar wakaf.
3	Arief Muzacky Juhanda	Implementasi Wakaf Uang Di Badan Wakaf Indonesia.	Sama-sama mengkaji tentang bagaimana peran Badan Wakaf Indonesia dalam pelaksanaan wakaf, sedangkan perbedaannya terletak pada fokusnya, di mana peneliti fokus kepada bagaimana peran BWI dalam pembinaan <i>nadzir</i> sedangkan penelitian Arief Muzacky fokus kepada peran BWI dalam mengelola wakaf uang serta pengimplementasiannya.

B. Tinjauan Umum tentang Wakaf

1. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf

a. Pengertian Wakaf menurut Hukum Islam

Secara bahasa wakaf berasal dari kata *waqafa-yaqifu* yang berarti menahan, berhenti,¹² sedangkan wakaf secara istilah antara lain dikemukakan oleh beberapa ulama sebagai berikut:

1) Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan benda yang menurut hukum, tetap milik *wakif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Kepemilikan harta wakaf tidak lepas dari *wakif*, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya, ia berpendapat bahwa wakaf itu tidak mengikat (tidak terikat oleh hukum-hukumnya), wakaf diberikan karena semata-mata hanya ingin memberikannya.¹³

2) Mazhab Maliki

Wakaf adalah perbuatan *wakif* yang menjadikan manfaat hartanya yang digunakan oleh penerima wakaf walaupun yang dimilikinya itu dengan cara menyewa atau menjadikan penghasilan-penghasilan dari harta tersebut, artinya *wakif* menahan hartanya dari semua bentuk pengelolaan kepemilikan, menyedekahkan atau pemanfaatan hasil dari harta tersebut untuk tujuan kebaikan, sementara harta tersebut masih utuh menjadi milik orang yang mewakafkan dalam tempo tertentu dan karenanya tidak boleh disyaratkan

¹²Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Terjemahan Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al Kahfi, c.X, Jakarta: Lentera, 2003, h. 635.

¹³Ibnu Qudamah, *Al Mughni Jilid 7*, Terjemahan Muhyidin Mas Rida dkk, c. I, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010, h. 750.

sebagai wakaf kekal (selamanya). Wakaf menurut Malikiyah tidak memutus (menghilangkan) hak kepemilikan barang yang diwakafkan, namun hanya memutus hak pengelolaannya.¹⁴

3) Mayoritas ulama

Mereka adalah dua murid Abu Hanifah, pendapat keduanya dijadikan fatwa dikalangan mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan, sementara barang tersebut masih utuh, dengan menghentikan pengawasan terhadap barang tersebut dari orang yang mewakafkan untuk pengelolaan diberikan sepenuhnya kepada yang menerima harta wakaf tersebut untuk tujuan kebajikan dan kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah. Harta tersebut lepas dari kepemilikan orang yang mewakafkan dan menjadi tertahan dengan dihukumi menjadi milik Allah, hasil dari wakaf tersebut harus disedekahkan sesuai dengan tujuan perwakafan tersebut, jika *wakif* wafat, maka harta yang diwakafkan tidak dapat diwariskan kepada ahli warisnya.¹⁵

b. Pengertian Wakaf Menurut Perundang-undangan Indonesia

1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam.¹⁶

¹⁴Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10*, Terjemahan Abdul Hayyie Al kattani, dkk, c. I, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 272.

¹⁵*Ibid.*, h. 271-272.

¹⁶Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977 pasal 1 ayat 1.

2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat dan keperluan lainnya sesuai dengan ajaran islam.¹⁷

3) UU No 41 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 1

Wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan / atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan / atau kesejahteraan umum menurut syariat.¹⁸

4) PP No 42 Tahun 2006

Wakaf adalah seseorang atau sekelompok orang (*wakif*) untuk memisahkan dan / atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan / atau kesejahteraan umum menurut syariat.¹⁹

Jadi dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah perbuatan *wakif* (pemilik harta) untuk melepaskan atau menahan harta benda miliknya yang diserahkan kepada penerima wakaf yang kemudian olehnya dikelola dan mempergunakan harta tersebut di jalan Allah.

c. Dasar Wakaf

Dalil yang menjadi landasan disyariatkannya wakaf terdapat di dalam Al Quran dan Hadis Nabi serta di dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan atau panduan peraturan wakaf dalam hukum positif Indonesia.

¹⁷Inpres RI No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 215.

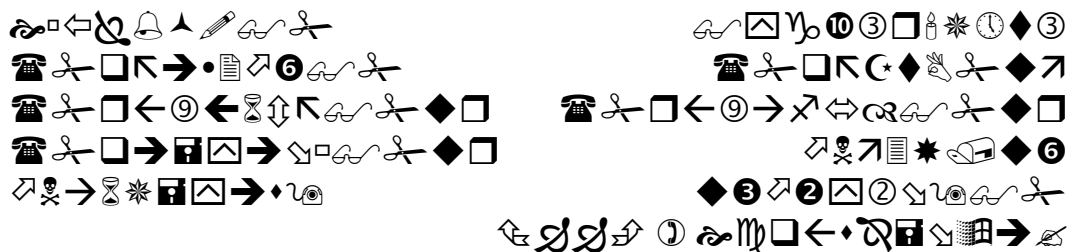
¹⁸Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Jakarta: Departemen Agama, 2007, h. 3.

¹⁹Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 pasal 1.

1) Al Quran

Meskipun tidak secara tegas wakaf disebutkan di dalam Al Quran, namun karena wakaf merupakan salah satu bentuk kebajikan melalui harta benda, maka para ulama pun memahami bahwa ayat-ayat Al Quran yang memerintahkan pemanfaatan harta untuk kebajikan juga mencakup kebajikan melalui wakaf, diantaranya yaitu:²⁰

a) QS. Al Hajj:77



Artinya: “hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”(QS. Al Hajj: 77)²¹

b) QS. Ali Imran:92



Artinya: “kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”(QS. Ali Imran: 92)²²

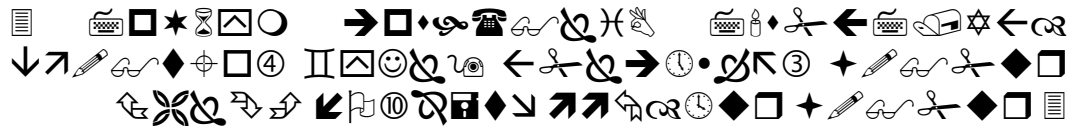
c) QS. Al Baqarah: 261



²⁰Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, c. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993, h. 103.

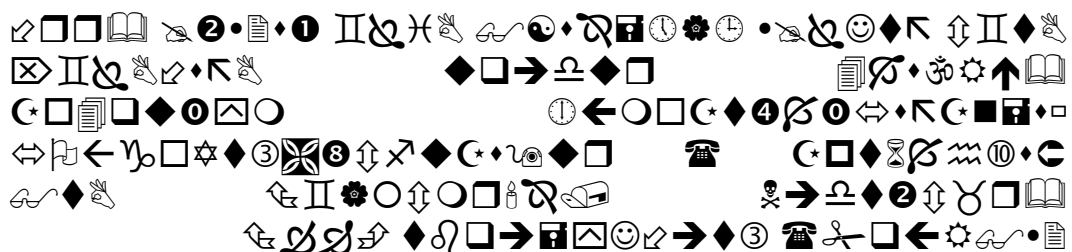
²¹Al Hajj (22): 77.

²²Ali Imran (3): 92.



Artinya: “perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas (karunia-Nya) lagi maha mengetahui”(QS. Al Baqarah: 261).²³

d) An Nahl: 97



Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik”(QS. An Nahl: 97).²⁴

2) Hadis

a) Hadis riwayat Ibnu Umar

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَحْضَرَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ
ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُهُ
فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا فَطُ هُوَ أَنْفُسُ
عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ
فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاغُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقَ
عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا
جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

²³Al Baqarah (2): 261.

²⁴An Nahl (16): 97.

قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ مُحَمَّدًا فَلَمَّا بَلَغْتُ هَذَا الْمَكَانَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ قَالَ
مُحَمَّدٌ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا قَالَ ابْنُ عَوْنٍ وَأَنْبَأَنِي مَنْ قَرَأَ هَذَا الْكِتَابَ أَنَّ فِيهِ غَيْرَ
مُتَأَثِّلٍ مَالًا

Artinya: “Telah meriwayatkan kepada kami Yahya bin yahya At Tamimy mengabarkan kepada kami Sulaim bin Akhdar dari Ibnu Aun dari Nafi dari Ibnu Umar *radhiyallahu anhum*, dia telah berkata: “Umar telah mendapat sebidang tanah di Khaibar kemudian dia datang menghadap Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* untuk minta petunjuk tentang cara pengelolaannya, katanya: “wahai Rasulullah! Saya telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Belum pernah saya memperoleh harta yang lebih baik daripada ini. Bagaimanakah saranmu mengenai perkara ini?” beliau bersabda: “jika kamu suka, jaga (tahan) tanah itu dan kamu sedekahkan hasilnya.” Lalu Umar mengeluarkan sedekah hasil tanah itu dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual dan dibeli serta diwarisi atau dihadiahkan. Umar mengeluarkan sedekah hasil tanahnya kepada fakir miskin, kaum kerabat dan untuk memerdekakan hamba sahaya. Juga untuk orang yang berjihad di jalan Allah serta untuk bekal orang yang sedang dalam perjalanan dan menjadi hidangan untuk tamu. Orang yang mengurusnya boleh makan sebagian hasilnya dengan cara yang baik dan boleh memberi makan kepada temannya ala kadarnya” (HR Muslim).²⁵

b) Hadis riwayat Anas

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ قَالَ حَدَّثَنِي
أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ
أَمَرَ بِنَاءَ الْمَسْجِدِ وَقَالَ يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا قَالُوا لَا وَاللَّهِ لَا
نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ

Artinya: “Telah meriwayatkan kepada kami Ishaq telah mengabarkan kepada kami Abdush Shomad berkata aku mendengar bapakku telah bercerita kepada kami Abu At Tayyah berkata telah bercerita kepadaku Anas bin Malik *radhiyallahu anhu*: ketika Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* tiba di Madinah, Beliau memerintahkan untuk membangun masjid (Nabawiyy) lalu berkata: “wahai Bani Najjar, tentukanlah harganya (jual lah) kepadaku kebun-kebun kalian ini”. Mereka berkata: “demi Allah, kami

²⁵Imam An Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Terjemahan Misbah, c. I, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011, h. 226-227.

tidak membutuhkan uangnya akan tetapi kami berikan kepada Allah”(HR Bukhari).²⁶

c) Hadis riwayat Abu Hurairah

حَدَّثَنَا الرَّيِّعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَدِّدُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَرَاهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ أَشْيَاءٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: “Telah meriwayatkan kepada kami Ar Rabi’ bin Sulaiman Al Muadzdzin, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb dari Sulaiman bin Bilal dari Al’ Ala bin Abdurahman dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda: ”apabila seorang muslim meninggal, maka amalannya terputus kecuali dari tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya” (HR. Abu Daud).²⁷

Maksud sedekah jariyah adalah wakaf, makna hadis tersebut adalah pahala tak lagi mengalir kepada mayat kecuali tiga perkara yang berasal dari usahannya di atas. Anaknya yang saleh, ilmu yang ditinggalkannya dan sedekah jariyahnya semuanya berasal dari usahanya.²⁸

3) Peraturan Perundang-undangan

Sejak dahulu, praktik wakaf telah ada sejak zaman kerajaan Islam dan telah menjadi kekuatan sosial politiknya pada saat itu. Saat ini, salah satu faktor penting yang ikut mewarnai corak dan perkembangan wakaf di

²⁶Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari Buku 15*, Terjemahan Amiruddin, c. II, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, h. 519.

²⁷Muhammad Nashirudin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud Jilid 2*, Terjemahan Abd. Mufid Ihsan dan M. Soban Rohman, c. II, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, h. 335.

²⁸Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 5*, Terjemahan Mujahidin Muhayan, c. III, Jakarta: Pena PundiAksar, 2011, h. 434.

Indonesia adalah ketika negara ikut mengatur kebijakan wakaf melalui seperangkat peraturan yang menjadi landasan hukum positif di Indonesia, dalam hukum positif Indonesia dasar hukum wakaf dapat di lihat dari beberapa peraturan di bawah ini:

- a) UU No 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, di mana negara secara resmi menyatakan perlindungan terhadap harta wakaf. Penegasan atas perlindungan tanah milik perwakafan tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah.
- b) PP No 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, peraturan ini mengatur inventarisasi tanah wakaf, proses terjadinya perwakafan tanah milik dan proses pemberian hak atas tanah wakaf.
- c) Instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), peraturan ini merupakan pembaharuan dari peraturan sebelumnya, beberapa perluasan dari peraturan tersebut antara lain berkaitan dengan objek wakaf, *nadzir* dan sebagainya.
- d) UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf, peraturan ini merupakan penyempurna dari peraturan yang sudah ada dengan menambahkan hal-hal baru yang merupakan pemberdayaan wakaf secara produktif. Dalam undang-undang ini terdapat perluasan benda yang diwakafkan yaitu mengatur tentang benda bergerak seperti uang dan benda benda bergerak lainnya.
- e) PP No 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf meliputi, ketentuan umum, *nadzir*, jenis harta, akta ikrar dan pejabat pembuat akta ikrar, tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf, pengelolaan dan pengembangan, bantuan pembiayaan Badan Wakaf Indonesia, pembinaan *nadzir* dan pengawasan harta benda wakaf.²⁹

2. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf akan dianggap sah jika telah memenuhi empat rukun yaitu adanya orang yang berwakaf (*wakif*), adanya benda yang diwakafkan (*mauquf*), adanya penerima atau peruntukan wakaf (*mauquf alaih / nadzir*) dan adanya akad atau *lafaz* atau pernyataan penyerahan wakaf dari tangan *wakif*,³⁰ adapun

²⁹Skripsi Arief Muzacky Juhanda, h. 23-25.

³⁰Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, c. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 66-67.

syarat wakaf adalah yang berkaitan dengan rukun, artinya dari rukun-rukun tersebut terdapat syarat yang harus dipenuhi.

a. Wakif

Persyaratan seorang calon *wakif* agar sah adalah harus memiliki kecakapan hukum dalam membelanjakan dan memanfaatkan hartanya, oleh karena itu kecakapan bertindak disini meliputi:

1) Dewasa

Anak yang belum dewasa belumlah layak untuk melakukan akad walaupun secara moral sangatlah terpuji dan memperoleh pahala seperti sedekah, hibah dan membebaskan budak, oleh karena itu wakaf yang dilakukan anak-anak tidaklah sah.³¹

2) Berakal sehat

Orang yang sakit ingatan (*majnun*), mabuk (*sakar*) dan idiot (*ma'tuh*) semua tindakannya tidak dapat dipertanggung jawabkan dan ia tidak sah beramal wakaf.³²

3) Pemilik penuh harta

Pewakaf adalah pemilik penuh terhadap harta tersebut, seseorang yang disertai tugas untuk mengurus harta atau hanya sebagai pengguna seperti

³¹H. Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*, c. I, Jakarta: Departemen Agama RI, 2010, h. 110.

³²*Ibid.*, h. 110-111.

pengelola, penggarap, penyewa, peminjam, dan pembeli gadai tidak dapat mewakafkan harta yang dikuasainya karena bukan pemilik penuh.³³

4) Pemilik sah harta

Pewakaf adalah pemilik sah harta dari harta tersebut, oleh karena itu, penggasab, penyerobot, pencuri dan pemilik harta ilegal, tidak sah berwakaf karena bukan pemilik sah dari harta tersebut.³⁴

5) Tidak tenggelam hutang

Orang yang mempunyai hutang yang melebihi jumlah hartanya tidak sah berwakaf. Ulama Hanafiyah membagi hutang kepada hutang yang melebihi harta dan hutang yang tidak melebihi harta. Orang yang mempunyai hutang yang melebihi hartanya tidak sah berwakaf dan orang yang mempunyai hutang tidak melebihi hartanya maka wakafnya sah.³⁵

b. Mauquf Bih

Benda yang diwakafkan disebut dengan *mauquf bih*, sebagai objek wakaf, *mauquf bih* merupakan hal yang sangat penting dalam perwakafan. Namun demikian, harta yang diwakafkan tersebut akan dipandang sah apabila telah memenuhi syarat-syarat berikut:

1) Kepunyaan sendiri

³³*Ibid.*, h. 113.

³⁴*Ibid.*, h. 114-115.

³⁵*Ibid.*, h. 116.

Barang yang hendak diwakafkan itu betul-betul harus di bawah penguasaan penuh dari *wakif*. Jika seseorang mewakafkan benda yang bukan miliknya maka hukumnya tidak sah seperti mewakafkan benda yang masih diundi dalam arisan, tanah yang masih dalam sengketa atau dalam jaminan jual beli.

2) Jelas bendanya

Barang yang diwakafkan itu harus jelas, baik kejelasan wujud, batasan maupun ukuran seperti misalkan mewakafkan tanah seluas 100m². Syarat ini dimaksudkan untuk menghindari perselisihan dan permasalahan yang mungkin terjadi dikemudian hari karena ketidak jelasan benda tersebut, dengan kata lain menjamin kepastian hukum.³⁶

3) Harta benda bergerak dan tidak bergerak

Kebiasaan masyarakat Indonesia sejak dulu sampai sekarang pada umumnya mewakafkan harta yang tidak bergerak seperti tanah, kuburan, bangunan untuk masjid, madrasah, pesantren, rumah sakit, panti asuhan dan lain lain dan pandangan tersebut disepakati semua mazhab. Selain benda tidak bergerak, dibolehkan juga berwakaf terhadap benda bergerak dan ulama sepakat akan hal itu kecuali dari kalangan mazhab Hanafi.

Kalangan mazhab Hanafi tidak membolehkan wakaf benda bergerak, dalam mazhab Hanafi dikenal dengan sebuah kaidah, “pada prinsipnya, yang sah diwakafkan adalah benda tidak bergerak”. Sumber kaidah ini adalah asas

³⁶Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan*, h. 61.

yang paling berpengaruh dalam wakaf, yaitu *ta'bid* (tahan lama). Mazhab Hanafi tetap memperbolehkan wakaf benda bergerak dengan beberapa persyaratan. Syarat pertama, keadaan benda bergerak itu mengikuti benda tidak bergerak dan itu ada dua macam, (1) barang tersebut mempunyai hubungan dengan sifat diam di tempat dan tetap misalnya bangunan dan pohon. Menurut ulama Hanafiyah bangunan dan pohon termasuk benda bergerak yang bergantung pada benda tidak bergerak, (2) benda bergerak yang dipergunakan untuk membantu benda tidak bergerak seperti alat untuk membajak, kerbau, yang dipergunakan untuk bekerja. Syarat kedua, kebolehan wakaf benda bergerak itu berdasarkan *atsar* yang membolehkan wakaf senjata dan binatang-binatang yang digunakan saat perang sebagaimana hadis riwayat Khalid bin Walid. Syarat ketiga, wakaf benda bergerak itu mendatangkan pengetahuan seperti wakaf kitab-kitab dan mushaf, menurut mereka pengetahuan adalah sumber pemahaman dan tidak bertentangan dengan *nash*. Mereka menyatakan bahwa untuk mengganti benda wakaf yang dikhawatirkan tidak kekal adalah memungkinkan kekalnya manfaatnya.³⁷

Mayoritas ulama selain Hanafiyah sepakat tentang kebolehan wakaf benda bergerak seperti lampu, tikar, pakaian, senjata, perabotan baik barang yang diwakafkan itu mandiri, disebut oleh *nash* atau diberlakukan dalam tradisi atau mengikuti yang lain seperti pekarangan.³⁸ Menurut mazhab Syafi'i bahwa barang yang diwakafkan haruslah barang yang kekal manfaatnya, baik barang bergerak maupun tak bergerak, menurut ulama mazhab Maliki berpendapat

³⁷Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008, h. 42-43.

³⁸Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam*, h.279.

boleh berwakaf benda bergerak baik yang menempel dengan yang lain, baik ada *nash* yang memperbolehkannya atau tidak, karena mazhab ini tidak mensyaratkan *ta'bid* (harus selama lamanya) bahkan wakaf itu sah meskipun sementara.³⁹

4) Benda tersebut telah diketahui ketika terjadi akad

Benda yang diwakafkan harus diketahui ketika terjadi akad. Wakaf yang tidak menyebutkan secara jelas terhadap harta yang akan diwakafkan, maka tidak sah wakafnya.⁴⁰

5) Berupa benda, benda yang tidak bertentangan dengan syariat serta memiliki nilai guna

Benda yang diwakafkan haruslah berupa benda, tidak boleh berwakaf manfaat semata tanpa ada benda dan juga tidak boleh berwakaf dengan suatu harta yang dilarang oleh syariat seperti babi, minuman keras dan buku-buku yang menyesatkan.

Harta yang digunakan juga harus memiliki nilai guna yaitu harta yang dimiliki oleh orang dan dapat digunakan secara hukum dalam keadaan normal ataupun tertentu seperti uang, buku dan harta-harta lain yang tidak bisa di pindah seperti tanah, bangunan dan lain-lain, sementara harta yang tidak memiliki nilai dapat dikatakan bahwa harta tersebut tidak dalam kepemilikan seseorang, tidak bisa disebut dengan harta yang bernilai seperti burung yang terbang di angkasa, ikan yang berenang di laut maupun sebagainya.

³⁹Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma Baru*, h. 43-44.

⁴⁰*Ibid.*, h. 41.

Dapat dipahami bahwa harta yang bernilai adalah harta yang tidak dalam kepemilikan seseorang serta tidak bertentangan syariat. Syariat juga tidak mengakui nilai dan harta itu dan tidak menjamin jika terjadi kerusakan seperti hal-hal yang memabukan dan yang telah diharamkan bagi umat islam. Dengan demikian harta atau benda-benda yang dapat diwakafkan adalah benda yang dapat diperjualbelikan dan dimanfaatkan.

6) Tahan lama

Benda wakaf haruslah tetap zatnya dan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang tidak habis sekali pakai. Namun demikian, makna keabadian wakaf bersifat relatif tergantung jenis benda yang diwakafkan. Benda-benda yang memiliki karakter lestari tidak cepat rusak seperti tanah, pohon, senjata dan sebagainya, keabadiannya selama benda-benda tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya, sedangkan benda-benda yang cepat rusak, tidak memiliki daya tahan lama seperti karpet, tikar, kipas, lampu dan sebagainya, keabadiannya sampai dengan benda-benda tersebut tidak berguna lagi.⁴¹

c. *Mauquf alaih*

Mauquf alaih adalah tujuan wakaf atau yang berhak menerima wakaf. Wakaf dilihat dari tujuannya adalah yang tidak bertentangan dengan syariat, tidak dibatasi waktu dan sesuatu yang tidak menimbulkan mudarat. Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syariat serta sasaran wakaf harus jelas, hendaklah disebutkan secara terang kepada

⁴¹H. Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan*, h. 119.

siapa *wakif* hendak berwakaf, ⁴² secara umum yang menjadi syarat sasaran wakaf itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, berorientasi kepada kebajikan, serta cakap hukum untuk memiliki dan menguasai harta.

Wakaf dilihat dari yang berhak menerima atau sasaran terbagi menjadi dua yaitu pertama wakaf ahli atau *zurriy* yaitu wakaf yang diperuntukan untuk orang tertentu seperti anak, cucu, kerabat, jadi wakaf *zurriy* adalah wakaf yang diberikan kepada kaum kerabat sesuai dengan ikrar, kedua wakaf *khairi* yaitu wakaf yang diperuntukan untuk kepentingan umum.⁴³

d. *Shigat*

Shigat adalah serah terima yang dilakukan oleh *wakif* kepada *nadzir* untuk menyatakan kehendaknya, pernyataan tersebut dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau isyarat. Lisan dan tulisan dapat dipergunakan oleh siapapun sedangkan isyarat hanya dapat dilakukan oleh seseorang dalam kondisi tertentu saja.⁴⁴ Syarat-syarat dalam *shigat* adalah:

- 1) Keberlakuan untuk selamanya yaitu *wakif* harus menyerahkan harta wakaf untuk selamanya, tidak dibatasi waktu sebab wakaf adalah pengeluaran harta untuk tujuan ibadah. Oleh karena itu, tidak boleh berwakaf untuk waktu tertentu.⁴⁵
- 2) *Ilzam*, saat *wakif* menyatakan ingin mewakafkan hartanya, maka wakaf itu mengikat dan lenyaplah hak kepemilikan *wakif* dari hartanya, dengan demikian *wakif* tidak boleh menyertakan dalam pemberian wakafnya syarat yang bertentangan dengan status wakaf seperti syarat *khiyar* yaitu hak melanjutkan atau mengurungkan pemberian wakaf, ada pendapat yang mengatakan bahwa wakafnya batal namun adapula pendapat yang mengatakan wakafnya sah namun syaratnya batal.⁴⁶
- 3) *Shigat* tidak terkait dengan persyaratan batil, menurut Hanafiyah ada tiga, pertama seperti seseorang yang berwakaf dengan maksud

⁴²Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan*, h. 62.

⁴³Surya Sukti, *Hukum Zakat dan Wakaf*, c. I, Yogyakarta: Kanwa Publisher, 2013, h. 72.

⁴⁴Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan*, h. 62.

⁴⁵Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam*, h. 312.

⁴⁶Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Fiqh Wakaf*, h. 58.

mensyaratkan tetapnya barang yang diwakafkan sebagai miliknya, maka wakafnya menjadi batal. Kedua, syarat yang merusak kemanfaatan barang yang diwakafkan, kemaslahatan pihak yang mendapatkan wakaf atau bertentangan dengan syariat seperti seseorang mensyaratkan pemberian hasil wakaf kepada orang-orang yang mendapatkan hak, maka syarat tersebut rusak atau fasid. Ketiga, syarat yang benar yaitu syarat yang tidak bertentangan dengan maksud tujuan wakaf dan tidak merusak manfaatnya seperti syarat mensyaratkan hasil pertama wakaf untuk membayar pajak-pajak yang menjadi kewajiban atau mulai memugar barang wakaf sebelum diberikan kepada orang-orang yang berhak.⁴⁷

3. Objek, Fungsi dan Tujuan Wakaf

Objek wakaf adalah harta benda yang oleh undang-undang wakaf disebut dengan harta benda wakaf yang didefinisikan sebagai harta benda yang memiliki daya tahan lama dan manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariat (pasal 1 UU Nomor 41 Tahun 2004). Dalam undang-undang disebutkan bahwa objek harta benda dapat berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak (pasal 16 UU Nomor 41 Tahun 2004).⁴⁸

Tujuan wakaf disebutkan dalam undang-undang adalah bertujuan untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya,⁴⁹ sedangkan fungsi wakaf bertujuan untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf bagi kepentingan ibadah dan peningkatan kesejahteraan umum. Fungsi dan tujuan di atas menunjukkan langkah maju, fungsi wakaf tidak hanya menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum seperti memfasilitasi

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸Tri Hidayati, *Hukum Perwakafan Hak Cipta Di Indonesia Upaya Intimisasi Antar Konsep dan Sistem Hukum*, t.tp, Smartmedia, 2013, h. 15.

⁴⁹Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 1 ayat (1).

sarana dan prasarana ekonomi, sarana dan prasarana pendidikan dan sebagainya.⁵⁰

C. Pengelolaan Harta Benda Wakaf

1. Badan Wakaf

Harta secara umum memerlukan pengelola yang dapat menjaga dan mengurus harta tersebut agar tidak terlantar dan sia-sia, demikian pula dengan wakaf yang juga memerlukan pengelola yang dapat mengurus dan menjaga harta benda wakaf, karena wakaf erat kaitannya dengan harta. Di Indonesia sendiri pengelolaan wakaf sudah diatur oleh undang-undang sejak dahulu yang puncaknya lahir UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf serta UU No 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya, dengan adanya peraturan-peraturan tersebut diharapkan mampu mengakomodir pelaksanaan wakaf di Indonesia.

Lahirnya undang-undang tersebut membawa konsekuensi bagi sistem pengelolaan wakaf di Indonesia agar lebih profesional dan independen. Dibutuhkan lembaga yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam mengelola dan memberdayakan harta benda wakaf, pentingnya lembaga tersebut dalam rangka untuk membina *nadzir* dalam mengelola harta, mengawasi segala bentuk aktivitas perwakafan dan memberikan biaya atau bantuan untuk tercapainya tujuan wakaf tersebut. BWI pun lahir sebagai jawaban bagi pengembangan dan pengelolaan perwakafan Indonesia kearah profesional

⁵⁰H. Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan*, h. 175-176.

sehingga tujuan dari wakaf tersebut dapat tercapai. BWI akan akan menduduki peran kunci, selain berfungsi sebagai *nadzir*, BWI juga akan membina, mengawasi *nadzir* dan memberikan bantuan, sehingga harta benda wakaf dapat dikelola secara profesional.

Kelahiran BWI merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kehadiran BWI, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47 adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Untuk kali pertama, keanggotaan BWI diangkat oleh Presiden Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) No. 75 tahun 2007, yang ditetapkan di Jakarta, 13 Juli 2007. Jadi, BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, serta bertanggung jawab kepada masyarakat.⁵¹

BWI berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan / atau Kabupaten / Kota sesuai dengan kebutuhan. Dalam kepengurusan, BWI terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan, masing-masing dipimpin oleh satu orang Ketua dan dua orang Wakil ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. Badan pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas sedangkan Dewan Pertimbangan adalah unsur pengawas pelaksana tugas BWI. Jumlah anggota

⁵¹Administrator, [Http://www.bwi.or.id/](http://www.bwi.or.id/) (diakses pada Kamis 10 Maret 2016 pukul 21.21 WIB)

Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 orang dan paling banyak 30 orang yang berasal unsur masyarakat.⁵²

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Keanggotaan perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia. Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan masa 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh Menteri. Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan wakaf Indonesia kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.⁵³

a. Tugas dan Wewenang Badan Wakaf

BWI mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam membantu pengelolaan baik dalam pembiayaan, pembinaan maupun melakukan pengawasan terhadap *nadzir* agar tujuan diadakannya dapat berjalan dengan maksimal. Salah satu peran yang menjadi sorotan agar wakaf dapat berjalan maksimal adalah dengan melakukan pembinaan.

Nadzir merupakan komponen yang sangat penting dalam perwakafan, karena tanpanya proses pelaksanaannya akan timpang. Dalam rangka upaya meningkatkan kualitas kepengelolaan, maka dalam hal ini yang sangat butuh perhatian adalah *nadzir* sehingga diharapkan nantinya mempunyai peran dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan inilah yang menjadi tugas dan wewenang BWI selaku badan yang bertugas dan berwenang untuk melakukan

⁵²Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 51-53.

⁵³Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 55-57.

pembinaan terhadap *nadzir* sesuai dengan peraturan yang sudah diamanatkan kepada BWI.

Selain dengan melakukan pembinaan, ada beberapa langkah-langkah konkrit yang bisa dilakukan BWI untuk menertibkan proses perwakafan di Indonesia, langkah tersebut menyangkut pendataan, pengaktaan dan pensertifikatan,⁵⁴ langkah-langkah tersebut yaitu:

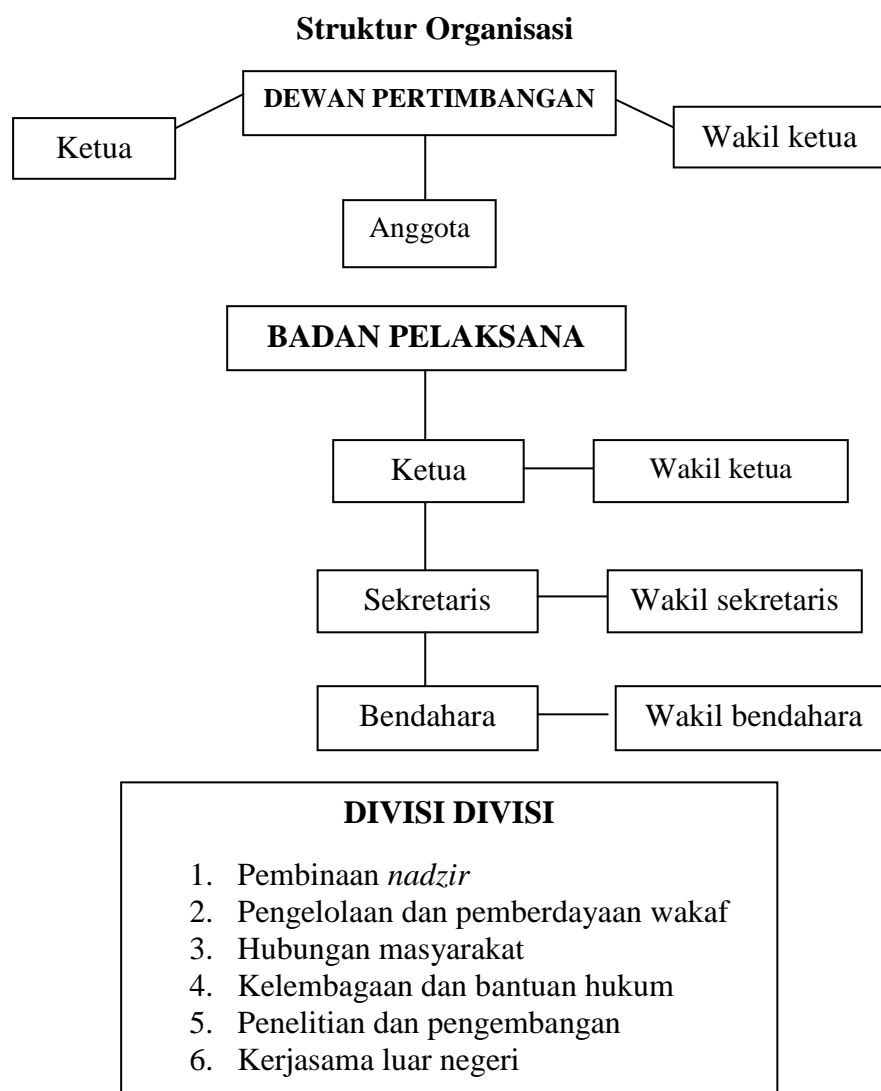
- a. Penyuluhan secara kontinu,
- b. Meningkatkan peran dan fungsi wakaf,
- c. Mengadakan atau meningkatkan koordinasi dengan lembaga sosial yang ada,
- d. Merealisir pencatatan, pengaktaan tanah wakaf,
- e. Penataran pejabat dan *nadzir*,
- f. Evaluasi dan pembenahan pengurus atau *nadzir*,
- g. Pertemuan berkala antar kecamatan,
- h. *Nadzir* atau pejabat wakaf harus punya program kerja baik untuk jangka pendek dan panjang,
- i. *Nadzir* harus punya pendidikan dan orang yang paham tentang wakaf dan upaya-upaya yang mesti dilakukan.⁵⁵

Upaya-upaya di atas dapat dilakukan oleh BWI maupun pihak terkait agar peraturan perwakafan nantinya terlaksana dengan baik dan diharapkan proses perwakafan di Indonesia dapat berjalan seperti yang diharapkan.

⁵⁴Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, c. I, ciputat press, 2005, h. 112.

⁵⁵*Ibid.*, h. 112-113.

b. Struktur Organisasi

**2. Manajemen Wakaf**

Pola pelaksanaan wakaf saat ini di Indonesia dari zaman dahulu sampai sekarang adalah wakaf yang berorientasi pada pemahaman tentang wakaf yang

masih ditempatkan sebagai ajaran yang murni dimasukan dalam kategori ibadah saja. Disaat wakaf sebenarnya tidak hanya sekedar untuk sarana ibadah saja namun bisa digunakan dalam tatanan sosial, artinya wakaf bisa dimanfaatkan untuk menyejahterakan umat dan tidak hanya sekedar dipahami sebagai sarana individual saja. Kebanyakan benda-benda wakaf diperuntukan untuk kepentingan pembangunan fisik seperti mesjid, musholla, pesantren, kuburan, yayasan dan sebagainya. Sehingga keberadaan wakaf ini belum memberikan kontribusi sosial yang lebih luas karena hanya untuk kepentingan yang bersifat konsumtif.

Pola perwakafan di atas sangatlah tidak memungkinkan untuk diterapkan lagi, disaat perkembangan zaman yang sudah berubah serta roda perekonomian yang sudah semakin memprihatinkan ini, padahal wakaf sangat potensial sebagai salah satu instrumen Islam untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

Hasil dari pola perwakafan yang diterapkan di atas, saat ini, banyak sekali kita temukan harta wakaf tidak berkembang bahkan cenderung menjadi beban pengelolaan atau malah tidak terurus dan yang paling menyedihkan harta wakaf hilang diambil alih oleh orang-orang yang memancing di air keruh,⁵⁶ sehingga pola pengelolaan di atas sangat tidak memungkinkan lagi untuk diterapkan pada masa sekarang.

Kejadian tersebut adalah akibat dari pengelolaan harta wakaf dengan pola pengelolaan “seadanya, nyambi” dan berorientasi pada “manajemen

⁵⁶Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam Yang Hampir Terlupakan)*, c. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, h. 174.

kepercayaan”, “sentralisme kepemimpinan” yang mengesampingkan aspek pengawasan. Dimensi ekonomi pada wakaf hanya akan dapat diraih dengan sukses manakala pengelolaan harta wakaf dikelola dengan profesional. Asas profesionalitas manajemen ini harus dijadikan semangat pengelolaan harta wakaf dalam rangka mengambil kemanfaatan yang lebih luas dan lebih nyata untuk kepentingan masyarakat banyak.⁵⁷

Pola perwakafan yang baik tentunya sangat erat kaitannya dengan manajemen atau model pengelolaan yang baik dan teratur. Sehingga sistem manajemen wakaf merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan wakaf di Indonesia. Kalau dalam paradigma lama wakaf selama ini lebih menekankan pentingnya kelestarian dan keabadian benda wakaf, maka dalam paradigma baru wakaf lebih menitikberatkan pada aspek pemanfaatan yang lebih nyata tanpa menghilangkan eksistensi benda wakaf itu sendiri. Untuk meningkatkan dan mengembangkan aspek kemanfaatannya, tentu yang sangat berperan sentral adalah sistem manajemen pengelolaan yang diterapkan.⁵⁸

Harus diakui bahwa pola manajemen pengelolaan wakaf yang selama ini berjalan adalah pola manajemen pengelolaan yang terhitung masih tradisional-konsumtif. Hal tersebut bisa diketahui melalui beberapa aspek:

- a. Kepemimpinan. Corak kepemimpinan dalam lembaga *kenadziran* masih sentralistik-otoriter (paternalistik) dan tidak ada sistem kontrol yang memadai. Kontrol yang memadai sangat penting untuk dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan.

⁵⁷*Ibid.*

⁵⁸Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma Baru*, h. 105

- b. Rekrutmen SDM *kenadziran*. Banyak *nadzir* wakaf yang hanya didasarkan pada ketokohan seperti ulama, kyai, tokoh masyarakat, ustadz dan lain-lain, bukan pada aspek profesionalisme atau kemampuan mengelola. Sehingga banyak benda-benda wakaf yang tidak terurus atau terkelola secara baik.
- c. Operasionalisasi pemberdayaan. Pola yang digunakan lebih kepada sistem yang tidak jelas (tidak memiliki standar operasional) karena lemahnya SDM, visi dan misi pemberdayaan, dukungan *political will* pemerintah yang belum maksimal.
- d. Pola pemanfaatan hasil. Dalam menjalankan upaya pemanfaatan hasil wakaf masih banyak yang bersifat konsumtif-statis sehingga kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak.
- e. Sistem kontrol dan pertanggungjawaban. Sebagai resiko dari pola kepemimpinan yang sentralistik dan lemahnya operasionalisasi pemberdayaan mengakibatkan pada lemahnya sistem kontrol, baik yang bersifat kelembagaan, pengembangan usaha maupun keuangan.

Sebagai salah satu elemen penting dalam pengembangan paradigma baru wakaf, sistem manajemen pengelolaan wakaf harus ditampilkan lebih profesional dan modern. Disebut profesional dan modern itu bisa di lihat pada aspek-aspek pengelolaan:

a. Kelembagaan

Pembentukan suatu lembaga khusus sangat diperlukan untuk mengelola benda-benda wakaf. apalagi untuk mengarah ke arah produktif, maka pertama tama yang harus dilakukan adalah dengan membentuk suatu badan atau lembaga yang khusus mengelola wakaf dan bersifat nasional yang diberi nama Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI diberi tugas untuk mengembangkan wakaf secara produktif, sehingga wakaf dapat memberikan kemanfaatan dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tugas utama badan ini adalah memberdayakan wakaf, baik wakaf benda bergerak maupun tidak bergerak yang ada di Indonesia sehingga dapat memberdayakan ekonomi umat.⁵⁹

⁵⁹*Ibid.*, h. 106-107.

Tugas BWI adalah membina *nadzir* yang ada di seluruh Indonesia. BWI bersama Kemenag mengawasi pengelolaan wakaf dengan membuat kebijakan-kebijakan yang mengarah pada peningkatan kemampuan *nadzir* sehingga mereka dapat mengelola wakaf yang menjadi tanggung jawabnya secara produktif.⁶⁰

b. Pengelolaan operasional

Standar operasional pengelolaan wakaf adalah batasan atau garis kebijakan dalam mengelola wakaf agar menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat banyak. Dalam istilah manajemen dikatakan bahwa yang disebut dengan pengelolaan operasional adalah proses-proses pengambilan keputusan yang berkenaan dengan fungsi operasi. Pengelolaan operasional ini terasa sangat penting dan menentukan berhasil atau tidaknya manajemen pengelolaan secara umum. Adapun standar operasional itu meliputi seluruh rangkaian program kerja (*action plan*).⁶¹

Standar keputusan operasional merupakan tema pokok dalam operasi kelembagaan *nadzir* yang ingin mengelola secara produktif. Keputusan yang dimaksud di sini berkenaan dengan lima fungsi utama manajemen operasional yaitu proses, kapasitas, sediaan (*inventory*), tenaga kerja dan mutu.⁶²

c. Kehumasan

Peran kehumasan (pemasaran) dianggap menempati posisi penting dalam mengelola harta benda wakaf. fungsi dari kehumasan dimaksudkan untuk:

⁶⁰*Ibid.*, h. 107.

⁶¹*Ibid.*, h. 108.

⁶²*Ibid.*

- 1) Memperkuat *image* bahwa benda-benda wakaf yang dikelola oleh *nadzir* betul-betul dapat dikembangkan dan hasilnya untuk kesejahteraan masyarakat banyak.
- 2) Meyakinkan kepada calon *wakif* yang masih ragu-ragu apakah benda-benda yang ingin diwakafkan dapat dikelola secara baik atau tidak. Peran kehumasan juga dapat meyakinkan bagi orang yang tadinya tidak tertarik menunaikan ibadah wakaf menjadi tertarik.
- 3) Memperkenalkan aspek wakaf yang tidak hanya berorientasi pada pahala *oriented*, tapi juga memberikan bukti bahwa ajaran islam sangat menonjolkan aspek kesejahteraan bagi umat manusia lain, khususnya bagi kalangan umat yang kurang mampu.⁶³

d. Sistem keuangan

Penerapan sistem keuangan yang baik dalam sebuah proses pengelolaan manajemen pengelolaan sangat terkait dengan akuntansi dan auditing.

Akuntansi, pada awalnya lebih diwarnai dan relatif terbatas pada aspek pertanggungjawaban. Namun dalam perkembangannya, mengalami transformasi sebagai salah satu sumber informasi dalam pengambilan keputusan bisnis. Misal pada bentuk dan kandungan laporannya, bila dalam tahapan awal ada penekanan yang berlebih pada aspek neraca, misalnya, kemudian beralih pada aspek laba-rugi.⁶⁴

Auditing, adalah pihak pelaksana melaporkan secara terbuka tugas atau amanah yang diberikan kepadanya, dan pihak yang memberikan amanah mendengarkan.⁶⁵

Ajaran islam mengajarkan bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, teratur dan tertib, prosesnya harus diikuti dengan baik, tidak boleh dilakukan dengan sembarangan dan ini merupakan prinsip utama dalam ajaran

⁶³*Ibid.*, h. 110-111.

⁶⁴*Ibid.*, h. 112.

⁶⁵*Ibid.*, h. 113.

islam. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan, yaitu:

a. Perencanaan atau *planning*

Perencanaan atau *planning* adalah proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Perencanaan termasuk di dalamnya perencanaan pengembangan benda wakaf, karenanya berguna sebagai pengarah, meminimalisasi pemborosan sumber daya, dan sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas.⁶⁶

Banyak cara dalam merencanakan sebuah perencanaan, salah satunya dengan menggunakan pendekatan 5 w 1 h : *what, when, who, where, why* dan *how*. Pendekatan ini menjelaskan “apa yang hendak dilakukan, kapan dilaksanakan, siapa pelakunya, di mana pelaksanaannya dan mengapa itu dijalankan” dan menggambarkan “bagaimana cara melakukannya”.⁶⁷

b. Pengorganisasian atau *organizing*

Pengorganisasian atau *organizing* adalah suatu kerangka tingkah laku untuk analisis proses pengambilan keputusan organisasi. Proses ini diharapkan dapat merumuskan kebijakan strategi dan taktik sehingga struktur organisasi menjadi tangguh dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana semua pihak

⁶⁶Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan*, h.

⁶⁷*Ibid.*, h. 176.

yang terlibat dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi.⁶⁸

c. Pengimplementasian atau *directing*

Pengimplementasian atau *directing* adalah proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak (para *nadzir*) dalam organisasi serta proses memotivasi agar semuanya dapat menjalankan tanggungjawab dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi.⁶⁹

d. Pengawasan atau *controlling*

Proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi. Dalam fungsi atau tahapan pengawasan (*controlling*), yang harus dilakukan adalah mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target kegiatan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan, mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan, dan melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target kegiatan.⁷⁰

3. Administrasi Harta Benda Wakaf

Pola pelaksanaan wakaf sebelum lahirnya undang-undang tentang wakaf, masyarakat islam indonesia masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan

⁶⁸*Ibid.*, h. 177.

⁶⁹*Ibid.*, h. 177-178.

⁷⁰*Ibid.*, h. 178.

keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal saleh yang mempunyai nilai mulia di hadirat Tuhan tanpa harus melalui prosedur administratif dan harta wakaf dianggap milik Allah semata dan tidak akan pernah ada pihak yang berani mengganggu gugat.⁷¹

Kebijakan pemerintah yang telah dikeluarkan baik berupa perundang-undangan maupun peraturan pemerintah merupakan upaya yang dilakukan untuk melaksanakan tertib administrasi perwakafan. Peraturan tersebut dibuat untuk menjaga dan melestarikan harta benda wakaf di Indonesia, jika pengelolaan harta benda wakaf tertata dengan baik maka seterusnya kemudian akan dapat dikembangkan, dengan adanya peraturan-peraturan yang memadai diharapkan praktek perwakafan di Indonesia menjadi tertib dan maksimal.

Pengadministrasian tanah wakaf dilakukan oleh pejabat khusus yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia untuk membuat AIW.

Pasal 1 ayat 6 UU No 41 Tahun 2004 menyebutkan:

pejabat pembuat akta ikrar wakaf, yang selanjutnya disingkat dengan PPAIW adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atau disingkat dengan PPAIW (selanjutnya disingkat PPAIW) adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia untuk membuat AIW, yang dimaksud

⁷¹Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI, 2008, h. 61.

dengan pejabat yang berwenang adalah pejabat yang sah secara hukum yang sudah ditunjuk oleh Menteri Agama Republik Indonesia untuk membuat AIW.

Ikrar wakaf merupakan salah unsur penting dalam perwakafan. Ikrar merupakan pernyataan dari orang yang berwakaf (*wakif*) kepada pengelola (*nadzir*) tentang kehendaknya untuk mewakafkan harta yang dimilikinya guna kepentingan / tujuan tertentu. Perwakafan tanpa ikrar tentunya akan mengakibatkan tidak terpenuhinya unsur perwakafan. Kalau unsur perwakafan tidak terpenuhi, maka secara hukum otomatis perwakafan tersebut dapat dikatakan tidak pernah ada. Untuk membuktikan adanya ikrar, adalah dengan cara menuangkan ikrar tersebut ke dalam AIW yang dibuat oleh PPAIW.

Legalitas tanah wakaf dimulai dari pengesahan ikrar wakaf yang dilakukan oleh *wakif* kepada *nadzir*. Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar dihadapan PPAIW,⁷² dalam hal ini adalah kepala KUA yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai pejabat yang berwenang⁷³ dan menjalankan proses pengadministrasian perwakafan.⁷⁴

PPAIW adalah petugas pemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, berkewajiban menerima ikrar dan *wakif* dan menyerahkan kepada *nadzir* serta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan.⁷⁵ Adapun fungsi dan tugas dari PPAIW adalah:⁷⁶

⁷²Kompilasi Hukum Islam pasal 223.

⁷³Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, Bab III pasal 5 ayat 1.

⁷⁴*Ibid.*, ayat 2.

⁷⁵Kompilasi Hukum Islam pasal 215 ayat 6.

⁷⁶Peraturan menteri agama RI No. 1 Tahun 1978 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah no. 28 tahun 1978 tentang perwakafan tanah milik.

- a. Meneliti kehendak *wakif*, tanah yang hendak diwakafkan, surat-surat bukti kepemilikan dan syarat-syarat wakif serta ada tidaknya halangan hukum bagi *wakif* untuk melepaskan hak atas tanahnya,
- b. Meneliti dan mengesahkan susunan *nadzir*, begitu pula anggota *nadzir* yang baru apabila ada perubahan,
- c. Meneliti saksi-saksi ikrar,
- d. Menyaksikan pelaksanaan ikrar wakaf,
- e. Membuat Akta Ikrar Wakaf,
- f. Menyampaikan Akta Ikrar Wakaf dan salinannya selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan sejak dibuatnya Akta Ikrar Wakaf.
- g. Menyelenggarakan daftar Akta Ikrar Wakaf,
- h. Menyimpan dan memelihara Akta dan Daftarnya dengan baik,
- i. Mengurus pendaftaran tanah wakaf.

Upaya tertib administrasi merupakan suatu kebutuhan dikarenakan kondisi sosial masyarakat di Indonesia yang lebih mengedepankan dokumen otentik sebagai jaminan dan memberikan kepastian hukum. Pada dasarnya wakaf menurut hukum Islam dan peraturan perundangan memiliki kesamaan namun yang membedakan terletak pada aspek prosedural dan administrasi,⁷⁷ di mana peraturan perundangan lebih menjanjikan kedua aspek tersebut ketimbang hukum Islam yang lebih mengedepankan asas saling percaya, oleh karena itu peraturan perundangan lebih sesuai untuk diterapkan sebagai konsekuensi dari kondisi sosial masyarakat di Indonesia.

Menciptakan tertib hukum dan administrasi untuk saat ini memang akan menemui tantangan berat karena dalam peraturan yang dijelaskan tentang jenis harta benda tidak hanya harta benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan namun juga berlaku untuk benda tidak bergerak seperti uang, logam, surat berharga dan ini akan membuat proses administrasinya akan menjadi sedikit lebih rumit.

⁷⁷Nur Fadhilah, "Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Ahkam Jurnal Hukum Islam*, Vol. 10, No. 1, Juli 2005, h. 1.

4. *Nadzir* Profesional

Secara bahasa *nadzir* berasal dari kata *nazira yandzaru* dan *tawalla yatawalli* dengan arti menjaga dan mengurus. Sebutan tersebut secara penuh dan bulat bersumber dari istilah yang berlaku di dalam lingkungan fikih, selain sebutan *nadzir* banyak juga para ahli yang menyebutnya dengan *mutawalli*.⁷⁸

Posisi *nadzir* sebagai pihak yang mengelola, mengurus dan menjaga harta mempunyai kedudukan yang sangat penting, meskipun para mujtahid tidak menjadikan *nadzir* sebagai salah satu rukun wakaf, namun ulama sepakat bahwa *wakif* harus menunjuk *nadzir*, artinya proses perwakafan ini sangat bergantung pada *nadzir*. Pengangkatan ini bertujuan agar harta tetap terjaga dan terurus. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa *nadzir* mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang diamanahkan kepadanya. Pada umumnya, ulama sepakat bahwa kekuasaan *nadzir* hanya terbatas pada pengelolaannya sesuai dengan peruntukan yang dikehendaki oleh *wakif*.

Saat mengelola harta wakaf, perlu diperhatikan kembali syariat yang mengatur tentang pengelolaan harta wakaf, baik syariat tersebut dari petunjuk kitab-kitab ulama terdahulu, pendapat para ulama modern, ataupun dari undang-undang yang berlaku. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, sebagai peraturan perundang undangan yang mengatur dan melindungi harta agama tersebut.

Bab V Pasal 42 UU No 41 Tahun 2004, menyebutkan bahwa:

⁷⁸Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, c. I, Jakarta: Tatanusa, 2003, h. 97.

“*Nadzir* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.”⁷⁹

Pasal 43 menyebutkan bahwa:

- a. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh *nadzir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip Syariah.
- b. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
- c. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka diperlukan lembaga penjamin syariah.⁸⁰

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari BWI.⁸¹

Untuk menjaga agar harta wakaf mendapatkan pengawasan dengan baik, kepada *nadzir* (pengurus perseorangan) dapat diberikan imbalan yang ditetapkan dengan jangka waktu tertentu atau mengambil sebagian dari hasil harta wakaf yang dikelolanya yang menurut UU No 41 Tahun 2004 jumlahnya tidak boleh lebih dari 10 % dari hasil bersih benda wakaf yang dikelolanya.⁸²

Nadzir juga berwenang melakukan hal-hal yang mendatangkan kebaikan harta wakaf dan mewujudkan syarat-syarat yang mungkin telah ditetapkan *wakif* sebelumnya. Kemudian juga memegang amanat untuk

⁷⁹Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 bab V pasal 42.

⁸⁰Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 bab V pasal 43.

⁸¹Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 44 ayat 1.

⁸²Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 bab II bagian kelima pasal 12.

memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan tersebut.⁸³

Pengertian profesional adalah seorang yang bekerja dengan serius, disiplin, bertanggungjawab (amanah) dan mengandalkan keahlian serta keterampilan yang tinggi, jika dikaitkan dengan *nadzir* yang diartikan sebagai pengelola maka dapat diartikan *nadzir* profesional adalah seseorang yang bekerja dengan serius, disiplin, amanah serta mempunyai keahlian dan keterampilan yang tinggi dalam mengelola harta benda wakaf.

Sampai saat ini profesi *nadzir* hanya menjadi profesi sampingan yang hanya dilakukan jika *nadzir* memiliki waktu senggang, belum lagi permasalahan yang harus dihadapi seiring dengan rumitnya birokrasi dan banyaknya biaya yang harus dikeluarkan, semisal dalam pengurusan akta ikrar wakaf dan sertifikat tanah wakaf.⁸⁴

Kedudukan sebagai *nadzir* seharusnya tidak lagi hanya menjadi pekerjaan di waktu senggang, tetapi harus menjadi profesi dan apabila sudah menjadi profesi, maka harus dituntut mempunyai ketekunan, keuletan, disiplin, komitmen. Selanjutnya, terkait dengan profesi berikut dipaparkan mengenai karakteristik profesi, yaitu:

- a. Adanya keahlian dan keterampilan khusus.
- b. Adanya komitmen moral yang tinggi.
- c. Orang yang profesional adalah orang yang hidup dari profesinya.
- d. Pengabdian kepada masyarakat.⁸⁵

⁸³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Dan Praktek Perwakafan Di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005, h. 35.

⁸⁴ Sudirman, *Total Quality Management (TQM) untuk Wakaf*, c. II, Malang: UIN-Maliki Press, 2013, h. 69.

⁸⁵ *Ibid.*, h. 70-71.

kenadziran sebagai salah satu profesi yang meniscayakan *nadzir* untuk bekerja serius, disiplin, amanah dan mengandalkan keahlian dan keterampilan tinggi.

5. Wakaf Produktif

Berbicara tentang wakaf produktif tentunya ini tidak terlepas dari keprofesionalitas *nadzir* dalam mengelola. Keprofesionalitas tersebut meliputi aspek manajemen yang diterapkan dalam mengelola. Apalagi undang-undang menuntut bahwa wakaf harus dikelola dan dikembangkan sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.

Manajemen pengelolaan menempati posisi teratas dan paling urgen dalam mengelola harta wakaf. Karena wakaf itu bermanfaat atau tidak, berkembang atau tidak tergantung pada pola pengelolaan. Kita lihat saja pengelolaan wakaf yang ada sekarang ini, kita temukan cukup banyak harta wakaf yang tidak berkembang bahkan cenderung menjadi beban pengelolaan atau malah tidak terurus.⁸⁶

Elemen penting dalam pengembangan wakaf adalah sistem manajemen pengelolaan wakaf yang harus ditampilkan lebih profesional dan modern. Dalam manajemen perwakafan ini yang bertanggung jawab adalah *nadzir*. Dalam mengelola sebuah manajemen dituntut harus memiliki ilmu manajemen, seorang manajer yaitu *nadzir*, harus memiliki keahlian manajerial, meliputi:

- a. Keahlian teknis (*technical skill*), yaitu keahlian yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan spesifik tertentu, seperti mengoperasikan komputer, mendesain bangunan, membuat *lay out* kantor dan lain-lain.
- b. Keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat (*human relation skill*), yaitu keahlian dalam memahami dan melakukan

⁸⁶Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan*, h. 174.

interaksi dengan berbagai jenis orang masyarakat. Contohnya adalah keahlian bernegosiasi, memotivasi, meyakinkan orang dan lain sebagainya. Dalam wakaf, terutama manajer penggalangan dananya, keahlian ini sangat diperlukan.

c. Keahlian konseptual (*conceptual skill*), yaitu keahlian dalam berpikir secara abstrak, sistematis, termasuk di dalamnya mendiagnosis dan menganalisis berbagai masalah dalam situasi yang berbeda, bahkan keahlian untuk memprediksi masa akan datang.

d. Keahlian dalam pengambilan keputusan (*decision making skill*), yaitu keahlian untuk mengidentifikasi masalah sekaligus menawarkan berbagai alternatif solusi atas permasalahan yang dihadapi.

e. Keahlian dalam mengelola waktu (*time management skill*), yaitu keahlian dalam memanfaatkan waktu secara efektif.⁸⁷

Dengan keahlian di atas, *nadzir* diharapkan dapat melaksanakan tugasnya secara amanah dan profesional. Jika tidak, wakaf hanya akan menjadi potensi ekonomi yang tidak akan mampu menyejahterakan masyarakat. Oleh sebab itu, profesionalisme *nadzir* adalah sebuah syarat dalam upaya untuk mengarahkan wakaf di Indonesia kearah produktif.

D. Problematika Pengelolaan Harta Benda Wakaf di Indonesia

Salah satu harta benda wakaf yang rawan akan terkena konflik adalah tanah, kalau dianalogikan tanah adalah gambaran keberadaan dan kualitas kehidupan yang timbul kepermukaannya, maka sudah sewajarnya bahwa harta tersebut dilindungi dan undang-undang di Indonesia sudah menjaminnya lewat peraturan-peraturan yang mewajibkan pengadministrasian harta tersebut. Permasalahan mengenai tanah dan statusnya merupakan hal yang sudah biasa dan sering terjadi di Indonesia, meskipun pada kenyataannya cukup rumit untuk mendapatkan penyelesaiannya karena tanah merupakan sesuatu yang

⁸⁷Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat Dan Wakaf, *Nazhir Profesional dan Amanah*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2005, h. 83-84.

sangat penting bagi bangsa kita dan ini mendorong pemerintah untuk membuat peraturan- peraturan guna untuk melindungi harta tersebut.

Menyadari arti pentingnya tanah wakaf tersebut, maka untuk lebih menjamin efektifnya pelaksanaan perwakafan tanah ini maka sudah barang tentu diperlukan adanya suatu pengawasan yang ketat dengan melakukan pendaftaran terhadap harta benda tersebut agar terpelihara sebagaimana mestinya.

Hambatan dalam pengelolaannya juga terkait dengan *nadzir* yang belum profesional, pengelolaan yang dilakukan kebanyakan hanya menjadi pekerjaan sampingan yang akan dilakukan jika hanya mereka memiliki waktu saja serta wakaf masih dikelola secara tradisional.⁸⁸

Salah satu hambatan yang selama ini terjadi dalam pengelolaan harta wakaf adalah keberadaan *nadzir* yang masih bersifat tradisional, ketradisionalan tersebut dipengaruhi, antara lain:

1. Masih kuatnya paham mayoritas umat islam yang masih stagnan (beku) terhadap persoalan wakaf. Selama ini, wakaf hanya diletakan sebagai ajaran agama yang kurang memiliki posisi penting. Selama ini mayoritas ulama indonesia lebih mementingkan aspek keabadian benda wakaf dengan mengesampingkan aspek kemanfaatannya.
2. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) *nadzir* wakaf, proses wakaf selama ini masih menggunakan asas kepercayaan. Banyak para *wakif* yang menyerahkan hartanya kepada tokoh agama seperti kyai, ustadz, ajengan, tuan guru dan lain sebagainya, sedangkan mereka yang sudah dipercayakan menangani harta tersebut kurang memiliki kemampuan atau kualitas manajerialnya sehingga harta benda wakaf banyak yang tidak terurus.
3. Lemahnya kemauan para *nadzir*, banyak *nadzir* wakaf yang tidak memiliki militansi yang kuat dalam membangun semangat pemberdayaan wakaf untuk kesejahteraan umat.⁸⁹

⁸⁸ *Ibid.*, h. 65.

⁸⁹ Achmad Djunaidi dan Thobie Al Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, c. IV, Depok: Mumtaz Publishing, 2007, h. 52-54.

Persoalan di atas nampaknya menggambarkan bagaimana pengelolaan harta secara umum yang hingga kini belum terselesaikan secara tuntas. Kepengelolaan yang lebih profesional merupakan suatu kebutuhan di tengah perkembangan zaman saat ini.

Masyarakat Indonesia juga lemah dalam memahami wakaf, masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang heterogen, tidak hanya dalam hal suku namun juga dalam hal keagamaan. Keterbatasan memaknai agama hanya berdasarkan pada keyakinannya semata dan menutup diri dari penafsiran ajaran agama dari golongan yang lain, ini bisa memicu perbedaan dalam memahami konsep wakaf. Misal, ketika wakaf tidak harus tertulis atau wakaf hanya untuk mesjid, maka ketika ada pemahaman lain bahwa wakaf harus dicatat dan wakaf bisa digunakan untuk kegiatan produktif pastilah akan memicu permasalahan.⁹⁰

Seperti yang telah diungkapkan di atas bahwa praktik perwakafan di Indonesia selama ini mengarah hanya kepada kepentingan peribadatan saja dan masih minim perwakafan dikelola secara produktif. Bahkan hal tersebut telah menjadi kebiasaan masyarakat dan menganggap bahwa wakaf hanya untuk beribadah saja. Mereka lebih banyak mempraktikkan wakaf keagamaan seperti mesjid, mushalla, makam dan lain-lain, sementara untuk tujuan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat kurang mendapat perhatian.

Nampaknya pola pemahaman terhadap wakaf yang terjadi selama ini harus dirubah oleh masyarakat Indonesia terkhusus terhadap *nadzir* sebagai pihak yang dianggap paling sentral dalam perwakafan, apalagi di tengah

⁹⁰ *Ibid.*, h.63-64.

permasalahan sosial masyarakat Indonesia dan tuntunan akan kesejahteraan ekonomi dewasa ini, eksistensi wakaf menjadi sangat urgen dan strategis. Di samping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan aspek kesejahteraan sosial. Oleh karena itu penting bagi masyarakat kita untuk memahami hal tersebut, agar kesejahteraan sosial dapat terwujud.

E. Kerangka Berpikir dan Pernyataan Penelitian

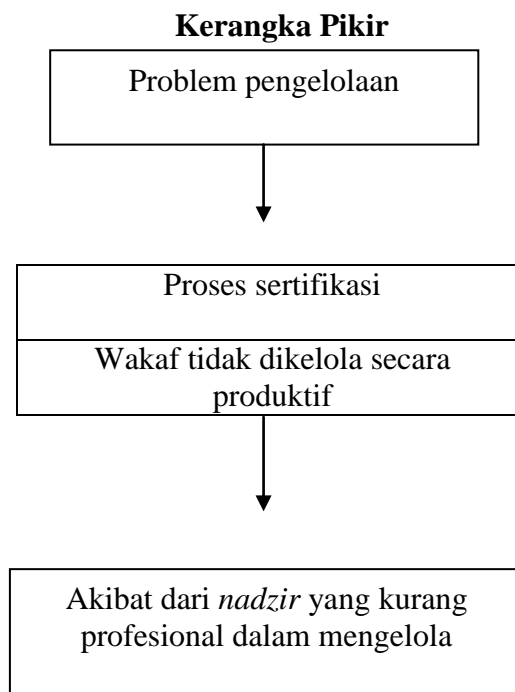
1. Kerangka Berpikir

Tujuan dari diadakannya pendaftaran tanah adalah dalam rangka untuk menjamin kepastian hukum tentang kedudukan dan status, agar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman karena tanah merupakan harta benda yang rawan akan konflik. *Nadzir* yang dipercaya untuk mengelola harus dapat bertanggungjawab akan tanah tersebut dengan melakukan pendaftaran. Namun, fakta di lapangan, berdasarkan observasi awal peneliti yang dilakukan di daerah Kecamatan Pahandut bahwasanya masih terdapat tanah-tanah wakaf yang masih tidak memiliki sertifikat.

Tuntutan akan perkembangan zaman dan permasalahan ekonomi umat yang semakin memprihatinkan membuat peran wakaf produktif sangat dominan untuk diterapkan di Indonesia dalam cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Wakaf produktif dinilai sangat berpotensi untuk membangun ekonomi umat, namun sayang potensi tersebut masih belum dimanfaatkan oleh masyarakat kita dan hanya akan menjadi angan-angan saja,

jika semua aparat penegak wakaf tidak bahu-membahu untuk memperbaiki pola pemahaman yang selama ini terjadi di masyarakat kita.

Mencermati keadaan demikian membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut, untuk lebih mudah memahaminya maka akan dibuat tabel kerangka pikir sebagai berikut:



2. Pertanyaan Penelitian

Daftar pertanyaan ini mengacu pada dua rumusan masalah yang kemudian ditujukan kepada *nadzir* maupun pihak-pihak yang dianggap tahu persis tentang pengelolaan wakaf di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut:

- a. adakah problematika yang dihadapi para *nadzir*, kemenag kota dan KUA dalam mengelola harta benda wakaf ?
- b. dalam bentuk apakah problema yang dihadapi para *nadzir*, kemenag kota dan KUA dalam mengelola harta benda wakaf ?

- c. apakah problema pengelolaan harta wakaf tersebut dibiarkan berlarut-larut atau sudah ada langka-langkah kongkrit untuk diselesaikan ?
- d. bagaimana solusi pengelolaan harta benda wakaf yang belum bersertifikat oleh *nadzir*, kemenag kota maupun KUA ?
- e. bagaimana solusi pengelolaan harta benda wakaf yang sudah bersertifikat namun belum produktif ?
- f. bagaimana pula pengelolaan harta benda wakaf yang produktif agar lebih berkembang dan berhasil guna baik terhadap harta wakaf itu sendiri dan juga bagi para *nadzir* maupun masyarakat banyak ?

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip oleh Lexy j. Moleong dalam bukunya yang berjudul metodologi Penelitian Kualitatif mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁹¹

Data yang dikumpulkan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar daripada angka-angka. Data tersebut mencakup transkrip wawancara, catatan lapangan, fotografi, videotape, dokumen pribadi, memo dan rekaman-rekaman resmi lainnya. Jenis pendekatan penelitian ini mencoba menganalisis data dengan segala bentuk kekayaannya sedapat dan sedekat mungkin dengan bentuk rekaman dan transkripnya.⁹²

⁹¹Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, c. 18, bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004, h. 3.

⁹²Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, c. II, Jakarta: Rajawali Press, 2011, h. 3.

Pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan agar penulis dapat mengetahui dan menggambarkan serta menganalisis permasalahan yang diperoleh di lapangan secara lugas dan terperinci serta berusaha untuk mengungkapkan data dan menguraikan tentang problematika pengelolaan harta benda wakaf di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu untuk melakukan penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan terhitung saat dikeluarkannya surat izin penelitian oleh Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya yaitu t: 55 sampai 1 Nopember 2016. Penelitian ini mengamati Pahandut kota Palangka Raya yang dianggap peneliti terdapat problematika pengelolaan harta benda wakaf di wilayah tersebut.

C. Objek dan Subjek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah problematika pengelolaan harta benda wakaf di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya. Sedangkan yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah para *Nadzir* selaku pengelola tanah wakaf yang berjumlah lima orang kemudian satu orang dari pihak Kemenag Kota dan BWI Kota Palangka Raya yang bertempat di Kemenag Kota Palangka Raya selaku badan pengelola harta benda wakaf, dan satu orang dari KUA kecamatan Pahandut selaku PPAIW yang mengeluarkan AIW.

D. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan yaitu data yang diperoleh secara langsung dari

lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan para narasumber dalam hal ini *nadzir* dan pihak yang dianggap tahu mengenai problematika pengelolaan wakaf di Kecamatan Pahandut. Sedangkan data kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber atau bahan kepustakaan, seperti buku-buku hukum, jurnal atau hasil penelitian dan literatur lainnya yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.

2. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan responden yaitu *nadzir* dan pihak yang dianggap tahu mengenai problematika pengelolaan wakaf di Kecamatan Pahandut.⁹³

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian.⁹⁴ Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) UU No 41 Tahun 2004
- 2) PP No 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No 41 Tahun 2004.
- 3) Kompilasi Hukum Islam
- 4) Buku-buku yang membahas tentang wakaf
- 5) Buku-buku fikih yang berhubungan dengan wakaf

E. Teknik pengumpulan data

⁹³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986, h. 10. h. 51.

⁹⁴Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, h. 47-57.

Data bagi suatu penelitian merupakan bahan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Oleh karena itu, data harus selalu ada agar permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan. Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder. Data primer pada penulisan ini diperoleh dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi arus informasi dalam wawancara yaitu: pewawancara, responden, pedoman wawancara dan situasi wawancara.⁹⁵

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur atau terpimpin, dalam wawancara ini peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.⁹⁶ Pertanyaan-pertanyaan itu mengacu seputar masalah tentang pengelolaan harta benda wakaf.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumen dan catatan-catatan yang tertulis baik berupa hasil dialog saat

⁹⁵Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 108.

⁹⁶Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, h. 190.

wawancara berlangsung ataupun menghimpun data tertulis berupa hasil penelitian, berkas-berkas, serta mempelajari secara seksama tentang hal-hal yang berkaitan dengan data.⁹⁷

Selanjutnya mengenai data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

F. Pengabsahan Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data pada dasarnya belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian. Sebab data itu masih merupakan data mentah dan bahkan masih memerlukan pengabsahan. Dalam hal ini untuk mengabsahkan data yang telah penulis peroleh maka teknik yang digunakan adalah dengan triangulasi.

Triangulasi adalah salah satu dari banyak teknik pengabsahan bahan dan data hukum yang sudah terkumpul. Teknik pengabsahan ini ialah dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁹⁸ Pada dasarnya ada beberapa macam teknik triangulasi yakni triangulasi sumber, triangulasi metode, penyidik dan teori. Namun pada penelitian ini untuk memperoleh tingkat keabsahan data, yang digunakan adalah triangulasi sumber. Menurut Patton yang dikutip oleh Lexy J. Moleong bahwa teknik triangulasi sumber dapat dicapai dengan jalan:

⁹⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pengantar*, Yogyakarta: Rineka cipta, 1998, h. 236.

⁹⁸Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian*, h. 178.

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, 2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, 3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, 4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang (rakyat) biasa, orang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan, 5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁹⁹

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa dalam penelitian menggunakan triangulasi sumber yang dapat diperoleh dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari *nadzir* dan pihak yang tahu tentang problematika pengelolaan harta benda wakaf di kecamatan Pahandut.

G. Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data tersebut. Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka dalam menganalisis data yang terkumpul peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Oleh karena itu, analisis deskriptif ini dimulai dari teknik klasifikasi data.¹⁰⁰ Dengan adanya metode deskriptif kualitatif, maka teknik analisis data dilakukan melalui 3 tahapan yaitu;

⁹⁹*Ibid.*

¹⁰⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013, h. 247.

1. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah atau data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
2. Penyajian data, yaitu penyusunan informasi yang kompleks ke dalam suatu bentuk yang sistematis, sehingga menjadi lebih selektif dan sederhana serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan data dan pengambilan tindakan.
3. Kesimpulan, yaitu merupakan tahap akhir dalam proses analisis data, pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh dari wawancara dan dokumentasi.¹⁰¹

¹⁰¹Husaini Usman dan Purnama Setiadi Akbar, *Metodologi penelitian sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000, h. 86.

BAB IV

PEMAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kecamatan Pahandut

a. Keadaan Geografis Kecamatan Pahandut

Kecamatan Pahandut adalah salah satu diantara lima kecamatan yang ada di Kota Palangka Raya. Kecamatan Pahandut memiliki luas wilayah 117.25 Km² dengan topografi yang terdiri dari tanah datar, rawa dan dilintasi oleh sungai kahayan,¹⁰² secara geografis dapat di lihat sebagai berikut:

- 1) sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kahayan Tengah
- 2) sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Kecamatan Sebangau
- 3) sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Jekan Raya.

b. Pemerintahan

Secara administrasi Kecamatan Pahandut terbagi menjadi enam kelurahan, yaitu Kelurahan Pahandut, Panarung, Langkai, Tumbang Rungan, Pahandut Seberang dan Tanjung Pinang. Untuk mempermudah koordinasi,

¹⁰²Tim Penyusun, *Pahandut dalam Angka 2012*, Palangka Raya: Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, 2012, h. xi.

setiap kelurahan terbagi menjadi beberapa rukun warga (RW) dan rukun warga terbagi menjadi beberapa rukun tetangga (RT). Kecamatan Pahandut terdiri dari 64 rukun warga dan 235 rukun tetangga dengan jumlah penduduk 78.504 jiwa.

Camat sebagai kepala pemerintahan di Kecamatan Pahandut adalah pelaksana pemerintahan umum yang membawahi enam kelurahan dalam melaksanakan tugasnya, camat mempunyai kedudukan sebagai kepala wilayah yang memimpin penyelenggaraan pemerintah, di tingkat kecamatan yang berada di bawah di⁶² kepada walikota. Dalam melaksanakan tugasnya, camat juga mempunyai tugas menetapkan pelaksanaan serta penyelenggaraan segala urusan pemerintah, pembangunan dan pembinaan masyarakat di tingkat kecamatan.

c. Keadaan Kelurahan, Data Penduduk, Pendidikan dan Mata Pencarian

Pemerintah Kota Palangka Raya sebelumnya terdiri dari 2 (dua) kecamatan, 21 (dua puluh satu) kelurahan. Pada tahun 2002 dimekarkan menjadi 5 (lima) kecamatan dan 30 (tiga puluh) kelurahan, sementara itu di Kecamatan Pahandut yang sebelumnya terdiri dari 1 (satu) kecamatan dan 11 (sebelas) kelurahan, dalam rangka mempercepat pelayanan kepada masyarakat, maka pada tahun 2002 dimekarkan menjadi 3 (tiga) kecamatan, 16 (enam belas) kelurahan dan Kecamatan Pahandut terdiri dari 6 (enam) kelurahan yaitu:¹⁰³

1) Kelurahan Pahandut (lama)

¹⁰³Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, *Buku Profil Tahun 2015*, Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, h. 3.

- 2) Kelurahan Panarung (lama)
- 3) Kelurahan Langkai (lama)
- 4) Kelurahan Pahandut Seberang (baru)
- 5) Kelurahan Tumbang Rungan (lama)
- 6) Kelurahan Tanjung Pinang (baru)

Sedangkan mata pencaharian penduduk sebagian besar pedagang yang tersebar di 6 (enam) kelurahan dan berdasarkan data statistik bahwa penduduk Kecamatan Pahandut terdiri dari:¹⁰⁴

Tabel 4
Jumlah Penduduk

Laki-Laki	40.051 Jiwa
Perempuan	38.453 Jiwa
Jumlah	78.504 Jiwa

Sumber: KUA Kecamatan Pahandut Tahun 2015

Kecamatan Pahandut dengan jumlah penduduk 78.504 jiwa memiliki tempat ibadah sebanyak 168 buah sebagai berikut:

Tabel 5
Tempat Ibadah

Mesjid	53 buah
Langgar	63 buah
Mushola	122 buah
Gereja	28 buah
Pura	1 buah
Vihara	-
Kelenteng	-

Sumber: KUA Kecamatan Pahandut Tahun 2015

Jumlah pemeluk agama dengan rincian:

Tabel 6
Jumlah Pemeluk Agama

Islam	47.826 Jiwa
Kristen Protestan	15.500 Jiwa
Khatolik	7.362 Jiwa

¹⁰⁴ *Ibid.*, h. 4

Hindu	2.600 Jiwa
Buddha	1.491 Jiwa

Sumber: KUA Kecamatan Pahandut Tahun 2015

2. KUA Kecamatan Pahandut

a. Letak Geografis

KUA Kecamatan Pahandut berlokasi di Jalan DR. Wahidin Sudirohusodo dimana letak posisinya terletak di jantung Kota Palangka Raya, secara administrasi berbatasan dengan:

- 1) sebelah utara : SLTP 2
- 2) sebelah timur : Bank Indonesia
- 3) sebelah selatan : BPS Kota Palangka Raya
- 4) sebelah barat : SLTP 2¹⁰⁵

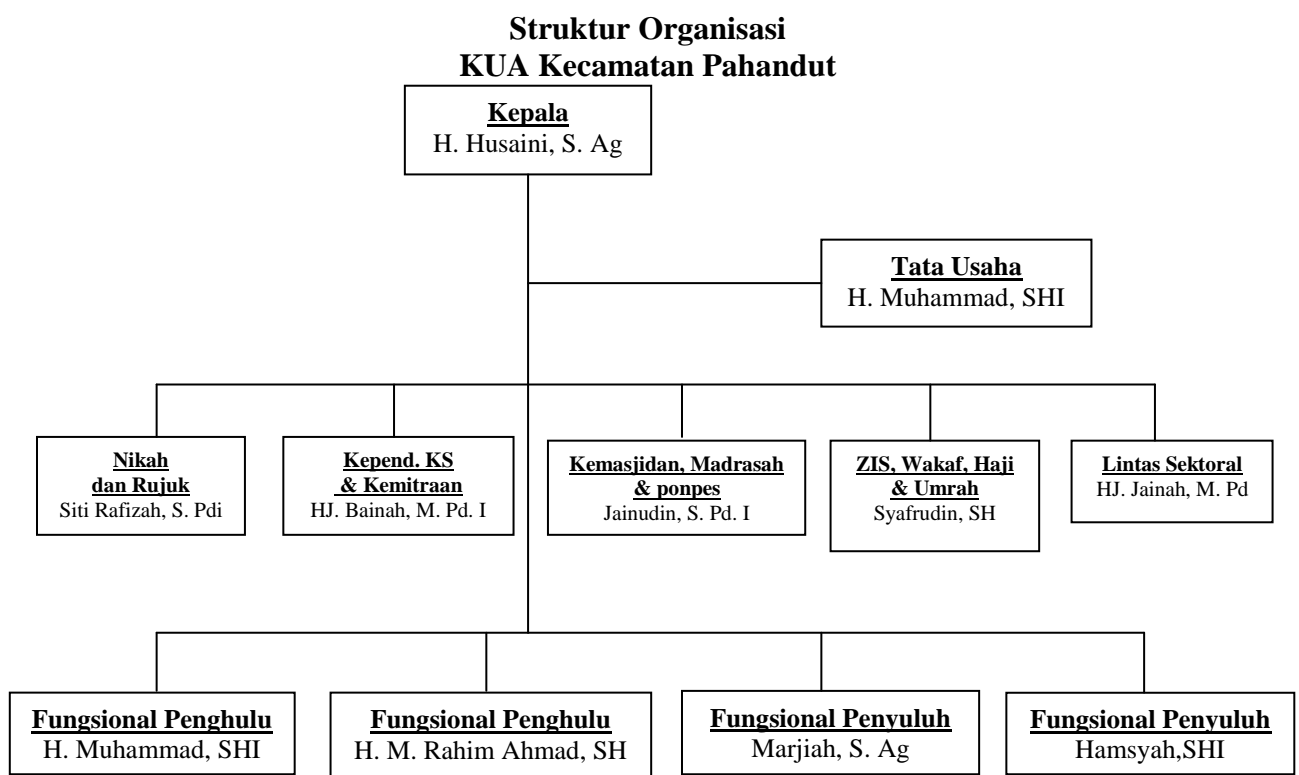
b. Personalia

Era reformasi, otonomi dan globalisasi yang terus bergulir selama ini telah membawa berbagai perubahan secara cepat dan menimbulkan dampak positif dan negatif bagi masyarakat baik dalam konteks keagamaan, sosial, ekonomi maupun politik. Untuk mengantisipasi timbulnya dampak negatif akibat perubahan yang terjadi, pegawai KUA Kecamatan Pahandut dituntut untuk bekerja keras dengan jumlah personil sebagai berikut: 1 (satu) orang kepala dan 2 (dua) orang fungsional penghulu, 3 (tiga) orang penyuluh dan

¹⁰⁵*Ibid.*, h. 7.

dibantu 4 (empat) orang staf, 1 (satu) orang tenaga honor jaga kebersihan dan 1 (satu) orang pembantu PP3N, kesemuanya berjumlah 12 orang.¹⁰⁶

Berikut struktur organisasi KUA Kecamatan Pahandut:



c. Visi dan Misi KUA kecamatan Pahandut

1) Visi

Unggul dalam pelayanan dan bimbingan umat islam, berdasarkan iman, takwa dan akhlak mulia.

2) Misi

a. Meningkatkan pelayanan bidang organisasi dan ketatalaksanaan

¹⁰⁶*Ibid.*

- b. Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi nikah dan rujuk
- c. Meningkatkan pelayanan kependudukan, keluarga sakinah dan kemitraan
- d. Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi kemasjidan
- e. Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi zakat, infak, shadaqah dan wakaf
- f. Meningkatkan informasi tentang madrasah, pondok pesantren, haji dan umrah
- g. Meningkatkan pelayanan lintas sektoral.

3. Data Subjek Penelitian dan Informan

Penelitian ini ada 5 subjek dan 2 informan yang diteliti di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya. Dari data ini peneliti membuat beberapa bagian, yaitu nama, pekerjaan, pendidikan serta alamat para subjek yang akan diteliti. Berikut ini data subjek yang peneliti dapatkan:

Tabel 7
Data Subjek Penelitian

No	Nama	Pekerjaan	Pendidikan	Alamat
1	AK	Swasta	SMA	Jalan Karanggen Nomor 93
2	S	PNS	D3	Jalan Bangaris
3	FY	Swasta	MI	Jalan Riau
4	I	Swasta	MA	Jalan Kalimantan
5	RJ	Swasta	SD	Jalan Kalimantan Gg.Pesanggrahan

Sumber: data diperoleh melalui observasi dan wawancara

Tabel 8
Data Informan

No	Nama	Pekerjaan	Pendidikan	Alamat
1	S	PNS	S1	Jalan RTA Milono
2	M	PNS	S2	Jalan G. Obos Gang. 12

Sumber: data diperoleh melalui observasi dan wawancara

Data ini merupakan hasil observasi yang peneliti dapatkan ketika melakukan observasi di lapangan. Ketika melakukan observasi, peneliti menemukan lima subjek dan tiga informan, lima diantaranya adalah sebagai *nadzir* yang mengabaikan ketentuan undang-undang dalam mengurus tanah wakaf dan dua orang informan yang masing-masing sebagai PPAIW (KUA kecamatan Pahandut), sebagai pengurus Kemenag Kota Palangka Raya sekaligus sekretaris BWI Kota Palangka Raya. Subjek yang diteliti berumur yang paling muda 40 tahun dan yang paling tua berumur 64 tahun.

Data di atas merupakan data yang peneliti dapatkan setelah observasi kemudian dilanjutkan dengan wawancara. Penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi mengenai bagaimana problematika pengelolaan harta benda wakaf di Kecamatan Pahandut dan bagaimana solusi untuk mengatasi problematika pengelolaan harta benda wakaf, dari data tersebut nantinya bisa didapatkan sesuai dengan apa yang diperlukan oleh peneliti.

Saat melakukan wawancara dengan subjek, terlihat para subjek cukup antusias menyambut kedatangan Mahasiswa IAIN yang sedang melakukan penelitian, ini terlihat saat mereka mau terbuka saat wawancara dan bercerita panjang lebar sehingga peneliti tidak menemukan kendala apapun saat mengumpulkan data yang didapat dari subjek.

4. Aset Tanah Wakaf di Kecamatan Pahandut

Tabel 9
Aset Tanah Wakaf

No	Kelurahan	Peruntukan	Luas	Alamat	Wakif	Nadzir	No AIW	Status
1	Pahandut	Mesjid Hidayatullah	433	Jl. Kalimantan	-	H. Abdul Bayat	233	Sudah
		Mesjid Nurul Hikmah	438	Jl. Darmosugondo	M. Djais Badri	H. M. Majedi	102	Sudah
		Mesjid Wakaf Rahmat	1.350	Jl. Dr. Murjani	Tihami	Dasuki	19	Sudah
		Mesjid Nurul Islam	6.405	Jl. Ahmad Yani	Tihami	H.M. Majedi	-	Sudah
		Mesjid Sirajul Jamaah	25	Jl. Bukit Rawi	H.M. Yusuf	H.Hamrani	-	Belum
		Langgar Syuhada	99	Gg. Syuhada	H.Abd. Hamid	A.Arbain	384	Belum
		Langgar Nurul Huda	206	Kampung Baru	H.MT.Suling	H.Bani.U	124	Sudah
		Langgar Nurul Taqwa	280	Jl.Kalimantan	-	Haderiansyah	-	Sudah
2	Pancarung	Mesjid Mujahidin	1.825	Jl.Rasak	H.Harun Efendi	H.Hatta Gani	204	Sudah
		Mesjid Nurul Hidayah	1.091	Jl.Turi	H.Bakri Hidayat	-	163	Sudah
		Mesjid Al Fitrah	1.267	Jl. Madang	Kasiman	Drs.Hendriyono	12	Sudah
		Mesjid Al Liqa	1.494	Jl. Meranti	Anwar Rais	A.Hanafiah	167	Sudah
		Mesjid Da'watul Haq	17.147	Jl. Adonis Samad	Hasan Halil	Abdul Majis	233	Sudah
		Mesjid Nur Al Banjari	9.660	Jl.Bangaris	-	Muchtar Noor	473	Sudah
		Langgar Asy Siroj	504	Jl. Ramin	H.Siroj	Sholikin	770	Sudah
		Langgar Nur Fadilah	624	Jl. Jati	A.Zainudin	Lamsi	194	Sudah
		Langgar Tariqatul jannah	629	Jl. Turi	H.Syakri	H.Djumriansyah	-	Belum
		Langgar At Taqwa	800	Jl. Akasia	H.Thabrani	Soekarno	518	Belum
		Yayasan Al Muhajirin	580.000	Jl. karanggan	Kamuk R	Abd. H Karimy	3	Sudah
		Yayasan Amanah Kodya	2.000	Jl. Jati raya I	H.Basri	Drs.H.Riduan S	302	Sudah
3	Langkai	Yayasan Muslimat NU	6.051	Jl. Pilau	Hj.Amlah	Hj.Ratna Banani	311	Sudah
		Mesjid Al Karomah	240	Jl. RTA Milono	Nur Ainah	H.Muhammad	-	Belum
		Mesjid Aqidah	4.567	Jl.Tambun Bungai	-	Jumadi Irin	-	Sudah
		Mesjid Fathul Iman	1.785	Jl. RTA Milono	H.Tukacil	H.Naspan S	234	Sudah
		Mesjid Fathul Jannah	17.000	Jl. RTA Milono	Supian Acil	Isra Umar	35	Sudah
		Mesjid Ar Rahman	1.800	Jl. RTA Milono	Sugi Santoso	Abdul hamid	359	Sudah
		Mesjid An Nuur	26.320	Jl. Katingan	-	Saleh Bahaudin	-	Sudah
		Musholla Abdullah	18	Jl. RTA Milono	-	H.Zainudin	-	Belum
		Langgar Nurul Amin	884	Jl. S.Parman	Soetarman	Kasdani	165	Sudah
		Musholla Manbaul Anwar	312	Jl. RTA Milono	Muhammad	Suryani	-	Belum
		LPTQ Palangka Raya	1.878	Jl. Adonis Samad	Hardiansyah	Saily Mochtar	325	Sudah
		Yayasan Budi Mulya	3.650	Jl. RTA Milono	Busra Chalid	Sulaiman	-	Sudah

		Ponpes Darul Ulum	22.000	Jl.Adonis Samad	H.A.Dj Nihin	Samsuri	114	Sudah
		Ponpes Darul Ulum	375.000	Jl. Dr. Murjani	Abdullah	Samsuri	53	Sudah
4	Tumbang Rungan	Mesjid Nurul huda	778	Tumbang Rungan	-	Fatmah	288	Sudah
		Langgar Miftahul Jannah	4.861	Tumbang Rungan	Mastu Hakit	Buntit B.Undas	441	Sudah
5	Tanjung Pinang	Mesjid Darussa'adah	603	Tanjung Pinang	Dudan Muntak	Daman Huri	288	Sudah
		Mesjid Al Amin	500	Jl.Bakung	Mbah Un	H.Marhusin	441	Belum

Sumber: KUA Kecamatan Pahandut Tahun 2016

B. Pemaparan dan Analisis Data

1. Pemaparan Data

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya. Berdasarkan data yang didapatkan dari para *nadzir* yang mengabaikan ketentuan undang-undang yang berjumlah lima orang kemudian satu orang informan yang berasal dari PPAIW (KUA Kecamatan Pahandut) sebanyak satu orang, pengurus Kemenag Kota dan BWI Kota Palangka Raya sebanyak satu orang.

Ada dua bagian rumusan pertanyaan yang peneliti tanyakan kepada subjek maupun informan, pertama tentang problematika dalam pengelolaan harta benda wakaf di Kecamatan Pahandut. Kedua, solusi terhadap problematika pengelolaan harta benda wakaf di Kecamatan Pahandut.

Penulis membagi subjek menjadi dua bagian, yang pertama subjek dari tanah wakaf yang tidak memiliki kekuatan hukum yaitu subjek I, II dan III. Kedua, subjek dari tanah wakaf yang memiliki sertifikat namun tidak produktif yaitu subjek IV dan V, penulis akan menguraikannya sebagai berikut:

a. Subjek sebagai *Nadzir*

1) Subjek I

Tanah wakaf yang diatasnya didirikan tempat pemakaman muslim ini terletak di Jalan Bangaris Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya. Tanah wakaf ini merupakan tanah wakaf dari Abdul Ghani yang diberikan sekitar akhir 80an. AK menerangkan bahwa tanah wakaf kuburan ini belum mempunyai sertifikat.

Nadzir untuk tanah wakaf yang diatasnya dibangun tempat pemakaman muslim ini adalah:

a) Identitas

Nama	: AK
Tempat Tanggal Lahir	: Palangka Raya, 7 Januari 1976
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SMA
Alamat	: Jalan Karanggan Nomor 93

b) Hasil Wawancara:

Wawancara dilakukan dikediaman AK di jalan Karanggan, saat wawancara, subjek cukup antusias dalam menyambut mahasiswa yang melakukan penelitian.

Adakah problematika yang dihadapi *nadzir* dalam mengelola harta benda wakaf?

AK menjawab:

“ada”

Dalam bentuk apa problema yang dihadapi *nadzir* dalam mengelola harta benda wakaf?

AK menjawab:

“problem yang kami hadapi dalam mengelola kuburan ini adalah pengurusan sertifikat yang belum tuntas sampai saat ini. Bukannya kami tidak mau ngurus, tapi surat-suratnya kaya SKT maupun sertifikat tanahnya ndak ada, sampai sekarang tidak ada itu surat-surat asalnya. Mungkin waktu itu proses perwakafannya secara lisan. Kalau seandainya surat-suratnya lengkap, pasti kami urus itu kuburan, tapi ya mau bagaimana tidak lengkap suratnya, ahli warisnya pun sudah meninggal, jadi kami bingungnya disitu”.

Apakah problem tersebut dibiarkan berlarut-larut atau sudah ada langkah-langkah konkrit untuk diselesaikan?

AK menjawab:

“sudah pernah kami lapor ke KUA, tapi KUAnyanya juga bingung, jadi ya kami juga tambah bingung. Dari KUA pun tidak ada jalan keluarnya, apa yang harus dilakukan, seandainya mereka mengarahkan, pasti kami ikuti. Ribetnya disitu, ada pemberitahuan kalau ada pengurusan sertifikat gratis untuk sarana ibadah maupun umum, tapi mereka tidak mengarahkan bagaimana ini ngurus tanah kuburan ni, sudah kurang lebih dua tahunan kami mempertanyakan masalah ini, tapi sampai sekarang belum ada jalan keluar, hingga sampai saat ini tidak kami urus lagi”.

Berdasarkan wawancara di atas, *nadzir* kebingungan bagaimana mengurus tanah wakaf yang surat-suratnya di awal sudah tidak ada, jadi hingga sampai saat ini status tanah wakaf tersebut masih mengambang. Meskipun sudah pernah ada upaya lapor ke KUA namun masih belum mendapatkan jalan keluarnya.¹⁰⁷

2) Subjek II

¹⁰⁷Wawancara dengan AK dikediamannya di jalan karanggan, tanggal 30 september 2016

Tanah wakaf yang diatasnya didirikan bangunan mesjid yang bernama Al Azhar ini terletak di Jalan Bangaris Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya mulai dibangun sekitar tahun 1997an.

Menurut penuturan S selaku pengelola mesjid, status tanah ini adalah tanah wakaf, namun mereka tidak mengetahui siapa yang mewakafkan tanah maupun *nadzirnya* sudah meninggal dan ahli warisnya tidak diketahui sampai sekarang, diketahui status tanah itu adalah tanah wakaf berdasarkan penuturan dari anak *nadzir*, namun ia juga tidak mengetahui siapa *wakif* tanah tersebut.

Nadzir untuk tanah wakaf yang diatasnya dibangun mesjid ini adalah:

a) Identitas

Nama	: S
Tempat Tanggal Lahir	: 20 Agustus 1971
Pekerjaan	: PNS
Pendidikan	: D3
Alamat	: Jalan Bangaris

b) Hasil Wawancara:

Wawancara dilakukan dikediaman S di jalan Bangaris, saat wawancara, subjek cukup antusias dalam menyambut mahasiswa yang melakukan penelitian.

Adakah problematika yang dihadapi *nadzir* dalam mengelola harta benda wakaf?

S menjawab:

“masalah yang kami hadapi dalam mengelola mesjid ini surat-suratnya belum lengkap, surat-surat tanah wakaf segala macam atau SKTnya tidak ada”

Dalam bentuk apa problema yang dihadapi *nadzir* dalam mengelola harta benda wakaf?

S menjawab:

“kami kesulitan mengurus sertifikatnya karena wakif dan nadzirnya sudah meninggal, ahli warisnya tidak diketahui keberadannya, jadi itu problemnya. sebenarnya kami ingin saja mengurus tanah wakaf ini karena kami ingin membuat yayasan, apalagi ini kan aset dan surat-surat itu penting, tapi ya mau bagaimana. kami bingung harus melakukan apa, kami tidak tahu bagaimana prosedurnya supaya tidak menyalahi dari ketentuan hukum Islam maupun legalitas undang-undangnya.¹⁰⁸

Apakah problem tersebut dibiarkan berlarut-larut atau sudah ada langkah-langkah konkrit untuk diselesaikan?

S menjawab:

“kami pernah lapor ke KUA, namun sampai saat ini belum ada jalan keluar, mereka mengatakan bahwa pengelola harus mengurus surat-suratnya biar jelas status tanahnya, ada program sertifikat gratis atau pemutihan atau apa lah itu, namun kami makin bingung, mereka tidak menjelaskan bagaimana mengurus sertifikat apabila wakif, nadzir sudah meninggal dan ahli warisnya tidak diketahui keberadaannya”.

Berdasarkan wawancara di atas, *nadzir* kesulitan mengurus tanah wakafnya, kondisinya hampir sama dengan kasus kuburan. Mereka kesulitan mengurus tanah wakaf yang *nadzir*, *wakif* dan ahli warisnya tidak ada. Hingga sampai saat ini, tanah wakaf mesjid ini tidak memiliki surat-surat yang jelas dan ukurannya pun tidak diketahui karena tidak memiliki SKT atau surat-surat keterangan yang lain.¹⁰⁹

¹⁰⁸*Ibid.*

¹⁰⁹Wawancara dengan S dikediamannya di jalan bangaris, tanggal 1 Oktober 2016.

3) Subjek III

Tanah wakaf yang diatasnya didirikan langgar ini bernama Darul Ihsan yang terletak di jalan Riau RT 02 RW 23. Langgar ini memiliki ukuran 15 x 15. Langgar ini diwakafkan oleh Damang pada tahun 1974. Langgar ini sudah mengalami dua kali renovasi, pada awalnya tahun 1974 langgar ini berukuran 7 x 4 kemudian pada tahun 1994 diperluas menjadi 9 x 10 sekaligus ditinggikan menyesuaikan jalan dan terakhir direnovasi pada tahun 2014 selama 7 bulan pengerjaan dengan ukuran 15 x 15 dan mulai digunakan pada tahun 2015.

Nadzir untuk tanah wakaf yang diatasnya dibangun langgar ini adalah:

a) Identitas

Nama	: FY
Tempat Tanggal Lahir	: Banjarmasin, 8 Agustus 1971
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: Madrasah Ibtidayah
Alamat	: Jalan Riau

b) Hasil wawancara:

Wawancara dilakukan dikediaman FY di jalan Riau, saat wawancara, subjek cukup antusias dalam menyambut mahasiswa yang melakukan penelitian.

Adakah problematika yang dihadapi *nadzir* dalam mengelola harta benda wakaf?

FY menjawab:

“sampai saat ini tidak ada masalah, saya selaku nadzir dalam mengelola tanah wakaf mesjid ini, dari sejarahnya itu tanah wakaf ni yang

mewakafkan tanah adalah Damang sekitar tahun 74 memang dari kepengurusan yang dulu sampai saya sekarang memang alhamdulillah tidak pernah terjadi masalah apapun”

Kemudian peneliti menanyakan bagaimana kejelasan status dari tanah wakaf ini. Pertanyaan ini ditujukan untuk mengetahui kejelasan status tanah wakaf langgar ini.

Apakah tanah wakaf langgar ini memiliki surat-surat?

FY menjawab:

“jadi kalau untuk kelengkapan surat-suratnya belum ada lagi sampai sekarang, belum kami buat lagi, tidak masalah kan. Memang dulu ada suratnya, surat pelepasan tanah tapi itu surat sudah hilang.” tutur FY menjawab sambil tertawa.

Apa alasan dari *nadzir* untuk tidak mengurus surat menyuratnya?

FY menjawab:

“alasannya tidak ada, karena memang selama ini tidak ada masalah sampai sekarang. Mungkin nanti kalau ada masalah atau gugatan baru nanti kami urus. Selama ini masyarakat juga tidak terlalu mempersoalkan hal tersebut, tapi nanti insya allah kedepannya kami pengelola dengan ahli waris wakif berencana akan mengurus surat-suratnya.”

apakah pernah ada himbauan dari pihak KUA?

FY menjawab:

“sampai saat ini belum ada lagi himbauan secara khusus dari KUA tentang kelengkapan surat-suratnya”

Berdasarkan wawancara di atas, memang ada kesengajaan dari pengelola untuk tidak mengadministrasikan harta benda wakafnya. Menurutny, sampai sekarang ini tidak pernah terjadi persoalan apapun mengenai status tanah wakaf tersebut, masyarakat juga tidak

mempersoalkannya sehingga mereka tidak berniat untuk mendaftarkan tanah wakaf mesjid tersebut.¹¹⁰

Tanah wakaf di atas (subjek I, II dan III) merupakan tanah wakaf yang tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Berbagai macam alasan dikemukakan oleh ketiga *nadzir* diatas, diantaranya mereka kebingungan karena surat-surat pada saat awal proses perwakafan tidak lengkap kemudian *nadzir* maupun *wakifnya* sudah meninggal ditambah lagi ahli waris tidak diketahui keberadaannya ataupun lagi *nadzir* yang secara sengaja memang tidak mendaftarkan tanah wakaf tersebut karena dirasa bahwa selama ini tidak pernah terjadi masalah apa-apa.

4) Subjek IV

Tanah wakaf yang dibangun Mesjid Hidayatullah ini terletak di Jalan Kalimantan, tanah ini adalah tanah wakaf dari H. Abdul Bayat yang diwakafkan sekitar tahun 90an. Tanah ini memiliki akta ikrar wakaf yang terdaftar pada tahun 1990.

Nadzir untuk pengelola tanah wakaf yang di atasnya dibangun mesjid ini adalah:

a) Identitas

Nama	: I
Tempt Tanggal Lahir	: Banjarmasin, 7 Mei 1952
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: Madrasah Aliyah

¹¹⁰wawancara dengan FY dikediamannya di jalan Riau Rt 02 Rw 23, tanggal 3 Oktober 2016.

Alamat : Jalan Kalimanta

b) Hasil Wawancara:

Wawancara ini dilakukan dikediaman beliau di Jalan Kalimantan. Saat wawancara subjek cukup antusias dalam menyambut mahasiswa yang sedang penelitian. Pada subjek kali ini peneliti fokus pada wakaf produktif.

Apa Bapak mengetahui tentang wakaf produktif ?

I menjawab:

“Saya belum pernah mendengar tentang wakaf produktif”

Untuk pemasukan Mesjid, biasanya diperoleh darimana ?

I menjawab:

“Biasanya kami dapat pemasukan itu dari masyarakat, itupun sebenarnya masih sangat kurang, biasanya paling banyak itu kami dapat Rp. 200.000 perminggu. Sebenarnya kami ingin sekali bantuan dari dana, tapi sudah kurang lebih lima tahunan ini kami belum pernah dapat bantuan lagi, padahal dulu kami sering dapat bantuan, jadi ya untuk sekarang ini dana didapat dari swadaya masyarakat saja, kalau mengenai wakaf produktif saya belum pernah tahu tentang itu”

Apakah pernah ada himbauan dari KUA atau Kemenag kota sendiri terhadap *nadzir* tentang wakaf produktif ?

I menjawab:

“Tidak pernah kami dapat himbauan dari mereka sebelumnya, padahal sebenarnya mereka tahu saja kalau saya ini pengelola mesjid ini, saya sering ke KUA kalau misalkan ada acara pernikahan saya biasanya ikut terlibat ataupun pada saat kegiatan muallaf biasanya ada pemberitahuan dari mereka tapi kalau untuk masalah wakaf seingat saya kalau saya tidak lupa sampai sekarang itu belum pernah ada”

Berdasarkan wawancara di atas, *nadzir* sama sekali tidak mengetahui tentang wakaf produktif, selama ini pemasukan mesjid didapat dari masyarakat sekitar.¹¹¹

5) Subjek V

Tanah wakaf yang diatasnya dibangun Langgar Nurul Takwa ini terletak di Jalan Kalimantan, tanah wakaf ini tidak diketahui tahun akta ikrar wakafnya namun tanggal sertifikatnya tercatat pada tahun 1992. Tanah wakaf ini sebelumnya diwakafkan oleh H. Bakar pada tahun 1990.

Nadzir untuk pengelola tanah wakaf yang diatasnya dibangun mesjid ini adalah:

a) Identitas

Nama	: RJ
Tempat Tanggal Lahir	: Palangka Raya, 12 Mei 1975
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SD
Alamat	: Jalan Kalimantan Gg. Pesanggrahan

b) Hasil Wawancara:

Wawancara ini dilakukan dikediaman beliau di Jalan Kalimantan. Saat wawancara subjek cukup antusias dalam menyambut mahasiswa yang sedang penelitian. Apa Bapak mengetahui tentang wakaf produktif ?

RJ menjawab ?

“Belum pernah tahu saya wakaf produktif, bahkan saya baru tahu sekarang saja. Belum pernah terpikir oleh kami warga disini tentang

¹¹¹wawancara dengan I dikediamannya di jalan Kalimantan, tanggal 17 Oktober 2016.

wakaf produktif ini. Mungkin nanti insya allah akan dilakukan, tapi dalam waktu dekat ini kami ingin memperbaiki dulu fasilitas yang ada seperti tempat wudhu ingin kami perbaiki dulu terus kami juga ingin membuat barak untuk tempat tinggal kaum langgar.”

Untuk pemasukan Mesjid, biasanya diperoleh darimana ?

RJ menjawab ?

“untuk pemasukan langgar, saya biasanya keliling mencari dana dari warga sekitar, kalau misalkan kami ingin mengadakan cara keagamaan seperti perayaan maulid, isra mi’raj, biasanya keliling kerumah warga sekitar sini.”

Apakah pernah ada himbauan dari KUA atau Kemenag kota sendiri terhadap *nadzir* tentang wakaf produktif ?

RJ menjawab:

“Saya pribadi sampai saat ini masih belum dapat arahan apapun tentang wakaf produktif, mungkin kalau untuk pengelola yang sebelum-sebelumnya mungkin ada karena kan memang langgar ini sudah cukup lama tahun 90an itu sudah berdiri jadi kepengurusannya itu berganti-ganti kan dan sampai ke saya yang mengurus langgar ini, belum pernah ada himbauan atau arahan dari KUA atau yang lain seputar tanah wakaf.”

Kasus untuk tanah wakaf ini sama seperti subjek sebelumnya dimana pengelola tidak mengetahui tentang wakaf produktif.¹¹²

Tanah wakaf di atas (subjek IV dan V) adalah tanah wakaf yang bersertifikat namun belum produktif. Menurut pengakuan *nadzir* mereka sama sekali tidak pernah mengetahui ataupun mendengar tentang wakaf produktif, mereka baru mengetahui istilah wakaf produktif pada saat peneliti melakukan wawancara dengan *nadzir* bersangkutan.

¹¹²wawancara dengan RJ dikediamannya di jalan Kalimantan, tanggal 17 Oktober 2016.

Jadi dapat diketahui berdasarkan dua subjek di atas kendala yang dihadapi untuk wakaf produktif ini, karena *nadzir* tidak mengetahui sama sekali tentang wakaf produktif sehingga penerapannya menjadi sangat sulit.

b. Informan

1) PPAIW (KUA Kecamatan Pahandut)

Informan yang pertama adalah orang yang berkecimpung dalam pengurusan tanah wakaf yaitu pihak PPAIW dalam hal ini adalah KUA Kecamatan Pahandut, adapun identitasnya sebagai berikut:

a) Identitas

Nama	: S
Tempat Tanggal Lahir	: Palingkau, 13 September 1967
Pekerjaan	: PNS
Pendidikan	: S1
Alamat	: Jalan RTA. Milono Kompl. Mariana Permai Blok B No. 55

b) Hasil Wawancara:

Wawancara ini dilakukan di kantor KUA Kecamatan Pahandut di jalan DR. Wahidin Sudirohusodo. Saat wawancara, informan cukup antusias dalam menyambut mahasiswa yang melakukan penelitian.

Dalam proses sertifikasi apakah ada kendala dari KUA supaya tanah wakaf di Kecamatan Pahandut teradministrasi oleh *nadzir*?

S menjawab:

“kendala yang kami hadapi itu karena nadzir kurang kreatif dalam mengurus tanah wakaf, kurang kreatif itu maksudnya mereka kurang memperhatikan prosedur perwakafan yang sebenarnya prosesnya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Mereka terfokus pada bangunan fisik, kalau misalkan bangunan mesjid atau langgar sudah berdiri, maka sudah cukup bagi mereka proses perwakafan sudah dijalankan, tanpa harus melalui proses administrasi.”

Apakah langkah konkrit dari pihak KUA untuk proses sertifikasi?

S menjawab:

“upaya yang kami lakukan dalam upaya sertifikasi ini yaitu kami mengadakan pertemuan atau seminar-seminar yang mengundang nadzir, biasanya kami mengadakan pertemuan tersebut satu kali dalam setahun itu pun kalau misalkan ada dana baru dapat terselenggara. Dari pertemuan itu kami meminta agar nadzir memperkuat status tanah wakaf dengan mendaftarkan tanah agar tanah tersebut dapat terlindungi. Padahal itu kalau misalkan tanah wakaf, maka harus ada surat-suratnya, sertifikat tanah wakaf itu kan dibedakan, kalo tidak ada maka itu bukan disebut tanah wakaf tapi itu tanah sosial saja statusnya”

Persoalan dari *nadzir* yang kurang kreatif merupakan kendala yang dihadapi KUA dalam proses sertifikasi. Mereka hanya terfokus pada bangunan, apabila bangunan tersebut sudah berdiri, maka mereka menganggap sudah menjalankan proses perwakafan.¹¹³

Padahal kalau diamati, status tanah yang diakui sebagai tanah wakaf maka harus dibuktikan oleh dokumen-dokumen otentik yang menunjukkan bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf.¹¹⁴

2) Kemenag Kota dan Pengurus BWI Kota Palangka Raya

Informan kedua adalah pihak Kemenag Kota dan BWI Kota Palangka Raya, adapun identitasnya adalah sebagai berikut:

¹¹³wawancara dengan S di Kantor KUA jalan DR. Wahidin Sudirohusodo, tanggal 4 oktober 2016.

¹¹⁴*Ibid.*

a) Identitas

Nama : M

Tempat Tanggal Lahir : Demak, 19 November 1976

Pekerjaan : PNS

Pendidikan : S2

Alamat : Jalan G. Obos 6 Gg. 12

b) Hasil Wawancara:

Wawancara ini dilakukan di kantor Kemenag Kota Palangka Raya di jalan AIS Nasution. Saat wawancara, informan cukup antusias dalam menyambut mahasiswa yang melakukan penelitian. wawancara kali ini peneliti menambahkan pertanyaan tentang wakaf produktif.

Dalam proses sertifikasi apakah ada kendala dari Kemenag Kota maupun BWI Kota Palangka Raya supaya tanah wakaf di Kecamatan Pahandut teradministrasi oleh *nadzir*?

M menjawab:

“tidak ada kendala dalam proses sertifikasi ini, mungkin kendalanya itu ya dibiaya, mereka menganggap bahwa pengurusan sertifikat itu butuh biaya padahal sebenarnya tidak. Sebenarnya pengurusan sertifikat tanah wakaf itu sangat mudah, dimulai dari tingkat kecamatan untuk pengikraran wakaf oleh PPAIW di KUA setempat kemudian dilanjutkan ke BPN untuk ditingkatkan menjadi sertifikat tanah wakaf yang kemudian dibedakan dengan sertifikat tanah milik. jadi kendalanya hanya dimasalah dana saja dimana masyarakat beranggapan bahwa pengurusannya itu membutuhkan biaya.”

Apa langkah konkrit dari pihak Kemenag Kota maupun BWI Kota Palangka Raya untuk proses sertifikasi?

M menjawab:

“kami sering melakukan sosialisasi, dari situ kami memberikan pengertian kepada nadzir bahwa dalam mengurus sertifikat itu sebenarnya gratis alias tanpa biaya. Gratis itu dari segi administrasi tapi ketika BPN sudah turun ke lapangan untuk mengukur tanah itu membutuhkan biaya untuk juru ukur segala macam dan ini sebenarnya wajar dilakukan.”

Kemudian peneliti lanjut dengan menanyakan wakaf produktif.

Mengenai wakaf produktif, apakah sudah ada wakaf produktif di Kota Palangka Raya?

M menjawab:

“memang wakaf produktif yang ada di Palangka raya ini kebanyakan berbentuk yayasan yang kemudian dibangun sarana pendidikan, kalau tanah yang lokasinya dibangun usaha-usaha seperti ruko kemudian di lantai atas dibangun kantor NU seperti di daerah muara teweh itu belum ada saat ini di Kota Palangka Raya, jadi kebanyakan bentuk wakaf produktif di palangka raya berbentuk sarana pendidikan”

Apa langkah Kemenag dalam memperkenalkan wakaf produktif?

M menjawab:

“terkait dengan wakaf produktif, kami sering melakukan sosialisasi untuk mengenalkan wakaf produktif, namun hingga saat ini tanah wakaf produktif yang berbentuk usaha seperti di daerah Muara Teweh itu yang dibangun ruko belum nampak di Kota Palangka Raya, kebanyakan wakaf produktif di palangka raya ini masih berbentuk sarana pendidikan.”

Berdasarkan wawancara di atas, menurut M sebenarnya tidak ada persoalan dalam proses sertifikasi ini. Pengurusan sertifikasi tanah wakaf itu gratis, namun yang terjadi dimasyarakat mereka menganggap bahwa itu membutuhkan biaya, jadi ada kesalahpahaman yang terjadi dimasyarakat. Langkah yang dilakukan oleh Kemenag Kota untuk meluruskan kesalahpahaman ini mereka sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberi arahan bahwa sebenarnya pengurusan sertifikat itu gratis, lewat

sosialisasi tersebut juga mereka manfaatkan untuk mengenalkan wakaf produktif kemasyarakat.¹¹⁵

2. Analisis Data

Analisis pada penelitian ini terkait dengan dua rumusan masalah yaitu bagaimana problematika pengelolaan harta benda wakaf dan bagaimana solusi terhadap problematika pengelolaan harta benda wakaf.

a. Analisis Problematika Pengelolaan Harta Benda Wakaf

Data yang peneliti kumpulkan di lapangan melalui wawancara dengan tiga orang subjek yang berstatus sebagai *nadzir* tanah wakaf yang peruntukannya di bangun sarana mesjid, langgar dan pekuburan merupakan aset yang tidak memiliki kekuatan hukum dan dasar hukum yang jelas, sehingga ini akan rawan disalahgunakan, meskipun pada perjalanannya mereka tidak menemukan konflik namun aset tersebut paling tidak harus diamankan demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, padahal undang-undang di indonesia sudah memfasilitasi itu semua namun hal tersebut tidak dimanfaatkan oleh kebanyakan masyarakat kita.

Kebiasaan wakaf secara lisan sudah mendarah daging di Indonesia, kebiasaan tersebut sejak dulu hingga sekarang masih saja dijalankan. Dikatakan oleh pegawai KUA, S bahwa *nadzir* kebanyakan kurang kreatif dalam mengelola tanah, mereka kurang memperhatikan pengurusan

¹¹⁵Wawancara dengan M di kantor Kemenag Kota Palangka Raya jalan AIS Nasution, tanggal 4 Oktober 2016.

administrasinya inilah yang menjadi problem KUA selaku PPAIW dalam proses sertifikasi harta benda wakaf di Kecamatan Pahandut.¹¹⁶

Tidak tersertifikatnya tanah-tanah wakaf merupakan imbas dari praktik yang dilakukan hanya menggunakan asas saling kepercayaan, tidak melalui prosedur yang telah dijelaskan oleh peraturan perundang-undangan. Kalau dilihat dari perkembangan zaman sekarang ini, wakaf secara lisan sudah tidak relevan untuk dijalankan karena tidak memiliki kepastian dan dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu agar kedudukan tanah wakaf tetap aman, terlindungi dan terpelihara maka sudah sepatutnyalah disertifikatkan.

Dalil-dalil pengadministrasian tanah wakaf dapat kita temukan peraturannya, sebagai berikut:

- 1) UU No 41 tahun 2004 pasal 11 butir a *nadzir* mempunyai tugas sebagai berikut:

melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.¹¹⁷

- 2) pasal 32 menyebutkan:

PPAIW atas nama nadzir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.¹¹⁸

- 3) pasal 218 kompilasi hukum islam menyebutkan:

pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendak secara jelas dan tegas kepada nadzir di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) yang kemudian menuangkannya dalam bentuk akta ikrar wakaf dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi.¹¹⁹

- 4) PP No 28 tahun 1977 pasal 5 ayat (1):

¹¹⁶Wawancara dengan S dikantor Kemenag KUA Palangka Raya Jalan DR. Wahidin Sudirohusodo, tanggal 4 Oktober 2016.

¹¹⁷Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11 butir a.

¹¹⁸Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 32.

¹¹⁹Kompilasi Hukum Islam Buku III: Hukum Perwakafan Pasal 218.

pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nadzir dihadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf yang kemudian menuangkannya dalam bentuk akta ikrar wakaf dengan diaksikan sekurang-kurangnya dua orang saksi.¹²⁰

5) pasal 9 ayat (1):

pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang dihadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf.¹²¹

Dalil di atas merupakan peraturan-peraturan yang telah dibuat untuk proses perwakafan di Indonesia, peraturan tersebut dimaksudkan agar pengelolaan wakaf berjalan secara lancar dan tertib.

Tata cara mengurus sertifikat tanah tidak begitu sulit bahkan sangat mudah untuk dilakukan, menurut M pihak yang wajib mengurus sertifikat tanah adalah *nadzir*, adapun tempat pengurusannya adalah kantor urusan agama setempat.¹²² Berikut tata cara ikrar wakaf dan proses pensertifikatan tanah wakaf:

- a) Calon *Wakif* (orang yang ingin mewakafkan) melakukan musyawarah dengan keluarga untuk mohon persetujuan untuk mewakafkan sebagian tanah miliknya.
- b) Syarat tanah yang diwakafkan adalah milik *Wakif* baik berupa pekarangan, pertanian (sawah-tambak) atau sudah berdiri bangunan boleh berupa tanah dan bangunan prduktif, atau bila tanah negara sudah dikuasai lama oleh *nadzir* / pengurus lembaga sosial-agama dan berdiri bangunan sosial-agama.
- c) Calon *Wakif* memberitahukan kehendaknya kepada *Nadzir* (orang yang disertai mengelola harta benda wakaf) di Desa / Kelurahan atau *Nadzir* yang ditunjuk.
- d) Calon *Wakif* dan *Nadzir* memberitahukan kehendaknya kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yaitu Kepala KUA yang mewilayahi tempat objek wakaf guna merencanakan Ikrar Wakaf dengan membawa bukti asli dan foto copy kepemilikan (Sertifikat Hak,

¹²⁰PP Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 5 ayat (1).

¹²¹PP Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 9 ayat (1).

¹²²Wawancara dengan M dikantor Kemenag Kota Palangka Raya jalan AIS Nasution, tanggal 4 Oktober 2016.

HGB, Petok atau Keterangan Tanah Negara (yang sudah dikuasai Lembaga Sosial dan didirikan bangunan sosial)

e) Bila objek yang diwakafkan berasal dari sertifikat hak milik yg dipecah (tidak diwakafkan keseluruhan) maka perlu dipecah dulu sesuai dengan luas yang diwakafkan (proses pemisahan pemecahan sertifikat di BPN). Bila dari tanah yayasan / bekas hak adat, atau dari tanah Negara perkiraan luas yang diwakafkan mendekati luas riil,

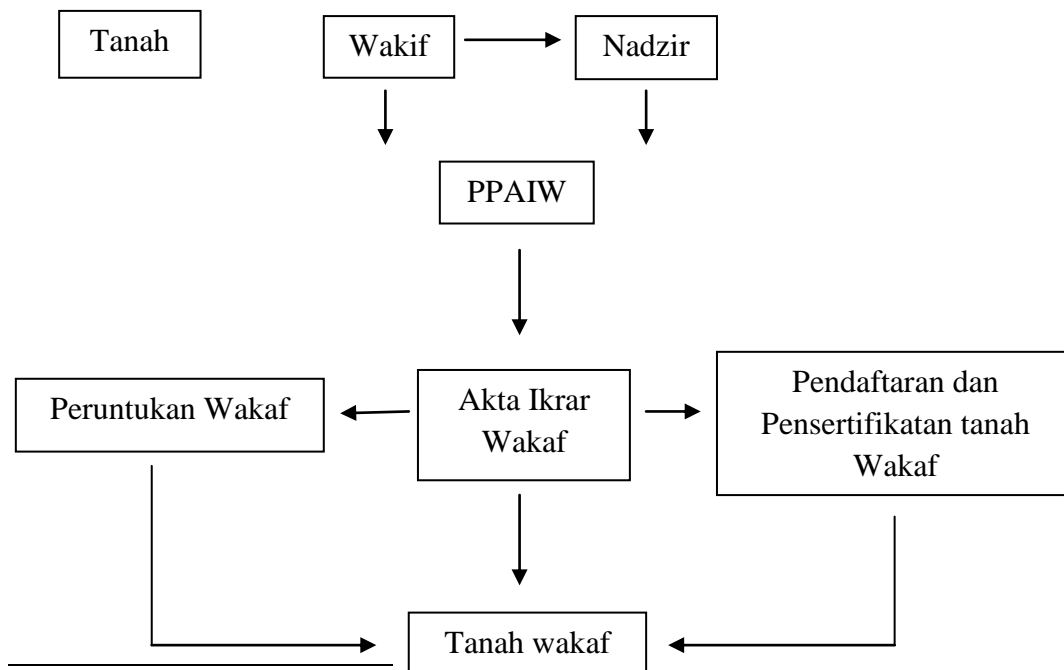
g) Calon *Wakif* & *Nadzir* memenuhi persyaratan administrasi yang dibutuhkan, diusahakan persyaratan administrasi telah lengkap sebelum dilaksanakan Ikrar Wakaf,

h) Setelah persyaratan diperiksa dan cukup memenuhi syarat, Ikrar Wakaf dilaksanakan di depan PPAIW dan diterbitkan Akta Ikrar Wakaf (untuk wakaf baru / wakifnya masih ada) atau Akta Ikrar Pengganti Ikrar Wakaf (untuk wakaf telah lama dilakukan oleh *wakif* di bawah tangan dan wakifnya telah meninggal dunia, ahli waris hanya mendaftarkan wakaf)

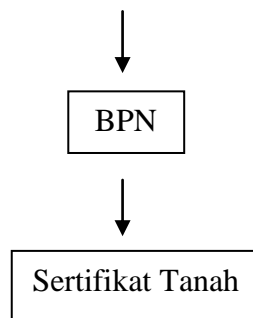
i) *Nadzir* atau orang yang ditunjuk mendaftarkan Tanah Wakaf ke Kantor BPN setempat untuk mendapatkan sertifikat tanah wakaf sesuai dengan persyaratan yang ada.¹²³

Untuk lebih mudah memahami alur pendaftaran tanah wakaf, maka akan dibuat skema sebagai berikut:

Skema pendaftaran tanah wakaf



¹²³KUAKecamatanBungihGresikJawaTimur, <http://www.kuabungah.blogspot.co.id/2011/04/prosedur-perwakafan-sertifikasi-tanah.html?m=1>, (diakses pada Selasa 15 Maret 2016 pukul 22.07 WIB)



Wajib sekiranya bagi setiap *nadzir* untuk melaksanakan proses perwakafan sesuai dengan peraturan yang ada agar di masa yang akan datang tidak terjadi konflik kepentingan.

Problema selanjutnya adalah terkait dengan wakaf produktif, menurut M sampai saat ini wakaf produktif di Kota Palangka Raya belum nampak. pasal 11 butir (b) *nadzir* bertugas berbunyi:

mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.¹²⁴

pasal 42 berbunyi:

nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.¹²⁵

Maksud dua pasal di atas dapat diketahui bahwa wakaf juga dapat dipergunakan ke arah produktif, namun hingga sampai saat ini belum dimaksimalkan oleh para *nadzir* di Kota Palangka Raya.

Menurut penuturan M, mereka sudah berupaya untuk mengenalkan wakaf produktif kemasyarakat yaitu dengan seringnya melakukan sosialisasi,

¹²⁴Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11 butir b.

¹²⁵Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 42.

melalui seminar-seminar maupun pertemuan yang mengundang para *nadzir*, namun sampai saat ini masih belum terlalu nampak implementasinya.¹²⁶

Masyarakat khususnya para *nadzir* bahkan tidak mengetahui apa itu wakaf produktif, hal ini diketahui saat peneliti melakukan wawancara dengan dua subjek yang berstatus sebagai *nadzir* maupun masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu sosialisasi dari pihak terkait memang sudah tepat untuk dilakukan hanya saja harus lebih diefektifkan lagi untuk memperkenalkan wakaf produktif.

b. Solusi Problematika Pengelolaan Harta Benda Wakaf

Tiga *nadzir* di atas memang tidak menjalankan tugas sepenuhnya sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang. Dalam UU No 41 Tahun 2004 Pasal 11 yang berbunyi:

Nadzir mempunyai tugas:

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.¹²⁷

Dalam PP No 42 tahun 2006 pasal 13 dijelaskan bahwa tugas *Nadzir* adalah:

- (1) *Nadzir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7, dan Pasal 11 wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- (2) *Nadzir* wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri.¹²⁸

¹²⁶Wawancara dengan M di kantor Kemenag Kota Palangka Raya jalan AIS Nasution, tanggal 4 Oktober 2016.

¹²⁷Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11.

Dalam Kompilasi Hukum Islam tugas dan kewajiban Nadzir diterangkan dalam pasal 220:

- (1) Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.
- (2) Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
- (3) Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.¹²⁹

Berdasarkan hasil penelitian terhadap para *nadzir*, mereka tidak melakukan tindakan apapun terhadap tanah yang dikelolanya, meskipun sebenarnya mereka mempunyai keinginan namun mereka menghadapi persoalan ketika *wakif* dan *nadzir* sudah meninggal kemudian ahli warisnya tidak diketahui keberadaannya. Persoalan tersebut menjadi hambatan bagi pengelola, seperti yang dialami oleh pengelola mesjid Al Azhar untuk mengurus sertifikat tanah wakafnya.¹³⁰ Berbeda halnya dengan kondisi yang terjadi di langgar Darul Ihsan, pengelola mengatakan tidak memiliki alasan apapun kenapa tanah tersebut tidak teradministrasi, ia mengatakan bahwa selama ini tidak pernah terjadi persoalan apapun terkait dengan tanah wakaf langgar tersebut. Sehingga pengelola maupun masyarakat sekitar tidak

¹²⁸PP Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 13.

¹²⁹Kompilasi Hukum Islam Buku III: Hukum Perwakafan Pasal 220.

¹³⁰Wawancara dengan S dikediamannya di jalan bangaris, tanggal 1 Oktober 2016.

mempersoalkan dan belum berkeinginan untuk mendaftarkan langgar tersebut.¹³¹

Bentuk persoalan dari *nadzir* maupun wakif kemudian ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya, sudah peneliti tanyakan kepada pihak KUA. Menurut penuturan pegawai KUA, tanah wakaf tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja, harus ada langkah-langkah konkrit yang diambil. Pengelola harus mengadakan rapat atau musyawarah dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, RT maupun masyarakat sekitar. Rapat diadakan untuk mencari jalan keluar dan kejelasan terhadap tanah yang diakui oleh warga setempat adalah tanah wakaf.¹³² pasal 62 menyebutkan bahwa:

penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.¹³³

Pasal di atas menjelaskan bahwa apabila terjadi sengketa ataupun persoalan yang terjadi maka langkah yang harus dilakukan adalah dengan melakukan musyawarah, dengan musyawarah tersebut diharapkan dapat mengatasi persoalan yang terjadi.

Dari rapat tersebut harus ditelusuri terlebih dahulu asal usul dari tanah wakaf tersebut. Apabila masih belum ada kejelasan, maka mereka dapat membentuk pengurusan yang baru ataupun kepengurusan yang lama yang sudah berjalan sebelumnya untuk mengelola tanah wakaf tersebut. Hal itu dilakukan untuk memperkuat status dan kepastian tanah wakaf yang kemudian

¹³¹Wawancara dengan FY dikediamannya di jalan Riau Rt 02 Rw 23, tanggal 3 Oktober 2016.

¹³²Wawancara dengan S dikantor KUA di Jalan DR. Wahidin Sudirohusodo, tanggal 4 Oktober 2016.

¹³³Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Pasal 132.

diberikan kepada pengelola berdasarkan kesepakatan rapat musyawarah tersebut. Kepastian kepengurusan ini didapat setelah seluruh masyarakat sepakat akan penunjukan pengelola yang baru maupun yang lama.¹³⁴

Setelah sepakat akan penunjukan pengelola kemudian akan ditindaklanjuti oleh RT, kemudian melalui keterangan RT tentang pengurusnya kemudian dilanjutkan ketingkat kelurahan untuk penerbitan SKT atas nama pengelola tersebut.¹³⁵

Langkah selanjutnya adalah melakukan ikrar wakaf dengan mencantumkan surat hasil rapat musyawarah disertai dengan SKT dan kemudian diterbitkanlah akta ikrar wakaf oleh PPAIW di KUA setempat kemudian diajukan ke BPN.¹³⁶

Persoalan di atas merupakan problematika yang terjadi di Kecamatan Pahandut, sudah sewajarnya harus dicari jalan keluar dan tidak boleh dibiarkan begitu saja karena ini merupakan aset yang harus dijaga dan dipelihara.

Berbeda halnya dengan *nadzir* yang mengelola tanah wakaf yang diatasnya dibangun Langgar Darul Ihsan, menurutnya selama ini tidak pernah terjadi persoalan yang terjadi sehingga ini tidak begitu mendapat perhatian bagi pengelola maupun bagi masyarakat sekitar.¹³⁷

¹³⁴Wawancara dengan S dikantor KUA di Jalan DR. Wahidin Sudirohusodo, tanggal 4 Oktober 2016.

¹³⁵*Ibid.*

¹³⁶*Ibid.*

¹³⁷Wawancara dengan FY dikediamannya di jalan Riau Rt 02 Rw 23, tanggal 3 Oktober 2016.

Melihat kondisi sekarang, penggunaan tanah yang semakin meningkat mendorong tanah wakaf harus memiliki surat-surat yang jelas. Maka tanah yang tidak memiliki surat-surat yang jelas itu sering mengundang kerawanan. sebagai contoh misalkan disaat ahli waris ataupun orang-orang yang tidak ada keterkaitannya dengan *wakif* mengklaim tanah tersebut adalah miliknya sehingga disaat tanah tersebut dialihfungsikan atau diambil, maka pengelola tak akan mampu melakukan perlawanan.

Berbeda halnya jika tanah wakaf tersebut jelas keberadaannya, maka ini akan dapat menjadi pegangan *nadzir* untuk mempertahankan eksistensi tanah wakaf tersebut ketika ada klaim dari orang lain yang mencoba untuk merubah peruntukannya. Sertifikat tersebut merupakan akta otentik yang dapat dipergunakan dalam penyelesaian sengketa yang mungkin saja akan timbul dikemudian hari.

Sengketa yang timbul karena tanah wakaf pada dasarnya ini berkaitan dengan jenis harta benda wakaf tersebut. Biasanya apabila tanah yang tidak memiliki kejelasan status maka akan berpeluang menimbulkan konflik. Peluang tersebut hendaknya dihindari, oleh karena itu pengadministrasian adalah langkah yang bisa dilakukan untuk menutup peluang tersebut.

Jika dikaitkan dengan kaidah ushul fikih yang artinya “meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan”, artinya meraih kemaslahatan yang dilakukan pengelola adalah lebih diutamakan dengan melakukan pengadministrasian harta benda wakaf dan mencegah terjadi konflik (kemafsadatan) dimasa yang akan datang.

Peneliti melihat bahwa kita tidak bisa selalu menyalahkan *nadzir* selaku pihak pengelola, diperlukan juga peran semua pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi keberadaan tanah wakaf tersebut seperti KUA, Kemenag maupun BWI Kota Palangka Raya. KUA harus berperan lebih aktif dengan turun kelapangan untuk melakukan pengawasan secara langsung terhadap *nadzir*. dengan turun ke lapangan, mereka dapat langsung memantau para *nadzir* apakah sudah terlaksanannya kewajiban para *nadzir*. KUA juga diharapkan lebih aktif untuk melakukan penertiban tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat tanah wakaf kemudian memberikan pengarahan terhadap *nadzir* setempat.

Pihak lain yang memiliki pengaruh dalam perwakafan adalah Kemenag Kota yang membidangi masalah perwakafan dan BWI selaku badan yang dibentuk pemerintah untuk kelancaran proses perwakafan di Indonesia. pasal 47 UU nomor 41 tahun 2004:

dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk badan wakaf indonesia.¹³⁸

Untuk meningkatkan pengelolaan, peran *nadzir* sangat menentukan tingkat keberhasilan dari tanah wakaf, oleh karena itu pembinaan terhadap *nadzir* harus efektif guna menciptakan *nadzir-nadzir* yang profesional. Pembinaan terhadap *nadzir* dapat ditemukan dalam uu nomor 41 tahun 2004 pasal 13:

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, nadzir memperoleh pembinaan dari menteri dan badan wakaf indonesia.¹³⁹

¹³⁸Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 47 ayat (1).

Menurut M, mereka sudah menjalankan amanat dari undang-undang tersebut, saat ini mereka cukup gencar melakukan sosialisasi guna memberikan pemahaman terhadap harta benda wakaf, baik itu tata cara pengelolaan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, bagaimana proses penyelesaian apabila terjadi persoalan maupun mengenalkan wakaf produktif ke masyarakat dan hal lainnya yang berkaitan dengan wakaf. Diharapkan nantinya dari sosialisasi ini pengelolaan tanah wakaf di Indonesia dapat berjalan tertib dan lancar.¹⁴⁰

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Problematika pengelolaan harta benda wakaf di kecamatan pahandut adalah kepengurusan sertifikat banyak yang belum tuntas baik itu dilakukan dengan sengaja atau ada kendala dari *nadzir*, *nadzir* tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *nadzir* kebingungan terhadap pengurusan tanah wakaf yang surat-suratnya tidak ada karena proses perwakafan yang secara lisan ditambah lagi dengan *wakif* dan *nadzirnya* sudah meninggal serta ahli warisnya tidak diketahui keberadaannya, sehingga tanah wakaf tersebut dibiarkan tidak terpelihara

¹³⁹Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 13.

¹⁴⁰Wawancara dengan M di kantor Kemenag Kota Palangka Raya jalan AIS Nasution, tanggal 4 Oktober 2016.

oleh *nadzirnya* saat ini, implementasi dari wakaf produktif masih kurang begitu nampak di Kota Palangka Raya, kebanyakan wakaf produktif masih berbentuk sarana pendidikan.

2. Solusi problematika pengelolaan harta benda wakaf di Kecamatan Pahandut adalah, melakukan pembinaan untuk meningkatkan peran *nadzir*, menertibkan secara berkala oleh pihak terkait terhadap tanah-tanah wakaf yang pengadministrasiannya belum tuntas, melakukan pengawasan oleh pihak terkait untuk pemeliharaan tanah wakaf agar tetap terpelihara dan berjalan sebagaimana mestinya, pihak terkait harus lebih giat lagi untuk memperkenalkan wakaf produktif ke masyarakat.

B. Saran

96

Berdasarkan hasil

an maka diharapkan:

1. Bagi *nadzir*, wakaf harus dipahami secara benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena ini terkait dengan harta maka sudah sepatutnyalah dilindungi keberadaannya.
2. Bagi Kantor Urusan Agama yang menangani bidang perwakafan harus memantau dengan turun langsung kelapangan apakah *nadzir* sudah menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bagi Kemenag dan BWI Kota Palangka Raya harus lebih aktif lagi dalam melakukan pembinaan guna memberikan pemahaman terhadap *nadzir* agar

kepengelolaan dapat berjalan sebagaimana amanat undang-undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Undang Undang

Inpres RI No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977.

Undang Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 41 Tahun 2006.

B. Buku

Al Albani, Muhammad Nashirudin, *Shahih Sunan Abu Daud Jilid 2*, (terjemah Abd. Mufid Ihsan dan M. Soban Rohman), c. II, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Al Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih AlBukhari Buku 15*, (terjemah Amiruddin), c. II, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- An Nawawi, Imam, *Syarah Shahih Muslim*, (terjemah Misbah), c. I, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Dan Praktek Perwakafan Di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur penelitian suatu pengantar*, Yogyakarta: Rineka cipta, 1998.
- Az Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10*, (terjemah oleh Abdul Hayyie Al kattani, dkk), c. I, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Indah Press, 1996.
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008.
- _____*Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Jakarta: Departemen Agama, 2007.
- _____*Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
- _____*Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis*, Jakarta: Direktorat Pemberdayan Wakaf Departemen Agama RI, 2008, h. 61.
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat Dan Wakaf, *Nazhir Profesional dan Amanah*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2005.
- Djunaidi, Achmad dan Thobieb AL Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, c. IV, Depok: Mumtaz Publishing, 2007.
- Halim, Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, c. I, ciputat press, 2005.
- Hamami, Taufiq, *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, c. I, Jakarta: Tatanusa, 2003.
- Hasan, Sudirman, *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif dan Manajemen*, Malang: UIN-Maliki Press, 2011.
- Hidayati, Tri, *Hukum Perwakafan Hak Cipta Di Indonesia Upaya Intimisasi Antar Konsep dan Sistem Hukum*, t.tp, Smartmedia, 2013.

- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, c. I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali* (terjemah oleh Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al Kahfi), c.X, Jakarta: Lentera, 2003.
- Muzarie, H. Mukhlisin, *Hukum Perwakafan Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*, c. I, Jakarta: Departemen Agama RI, 2010.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barakatullah, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum*, c. I, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Qudamah, Ibnu, *Al Mughni Jilid 7*, (terjemah oleh Muhyidin Mas Rida dkk), c. I, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 5*, (terjemah oleh Mujahidin Muhayan), c. III, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011
- Sudirman, *Total Quality Management (TQM) untuk Wakaf*, c. II, Malang: UIN-Maliki Press, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sukti, Surya, *Hukum Zakat dan Wakaf*, c. I, Yogyakarta: Kanwa Publisher, 2013.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Palangka Raya: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), 2013.
- Usman, Husaini dan Purnama Setiadi Akbar, *Metodologi penelitian sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, c. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Wadjdy, H. Farid dan Musyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan)*, c. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- WJS, Poerwadarma. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, c. IX, Jakarta : Balai Pustaka, 1986.

C. Jurnal

Nur Fadhilah, “Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Ahkam Jurnal Hukum Islam*, Vol. 10, No. 1, Juli 2005.

D. Internet

Administrator, [Http://www.bwi.or.id/](http://www.bwi.or.id/) (diakses pada Kamis 10 Maret 2016 pukul 21.21 WIB).

Administrator, [Http://bwi.or.id/index.php/in/tentang-wakaf/data-wakaf/data-wakaf-tanah.html](http://bwi.or.id/index.php/in/tentang-wakaf/data-wakaf/data-wakaf-tanah.html) (diakses pada Kamis 28 Maret 2016 pukul 11.04 WIB).

KUA Kecamatan Bungih Gresik Jawa Timur, [Http://www.kuabungah.blogspot.co.id/2011/04/prosedur-perwakafan-sertifikasi-tanah.html?m=1](http://www.kuabungah.blogspot.co.id/2011/04/prosedur-perwakafan-sertifikasi-tanah.html?m=1), (diakses pada Selasa 15 Maret 2016 pukul 22.07 WIB).

FOTO DOKUMENTASI WAWANCARA



Bersama informan S



Bersama informan M



Bersama subjek FY



Bersama subjek I



Bersama subjek RJ



Bersama subjek S

Nama : Ahmad Kurniawan

Nim : 1202110399

Jurusan / Program Studi : Syari'ah / Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (AHS)

TTL : Kasongan, 24 Agustus 1994

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Jln. G. Obos IX Palangka Raya

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Pendidikan : SDN 5 Baamang Hulu lulus tahun 2006
SMPN 1 Katingan Hilir lulus tahun 2009
SMAN 1 Katingan Hilir lulus tahun 2012

Email : Kurniawanahmad48@yahoo.co.id

Nama Orang Tua : Ayah : Yusran Uda
Ibu : Sariami

Alamat : Jln. Cilik Riwut RT. 07 RW. 0 Kelurahan Kasongan
Baru Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan.

Palangka Raya, Nopember 2016

Ahmad Kurniawan